



# LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TA 2022

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



## **BAGIAN ANGGARAN 067**

Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan, 12750,

DKI Jakarta

Telp : 021 - 7994372

[Kemendes.go.id](http://Kemendes.go.id)

## KATA PENGANTAR

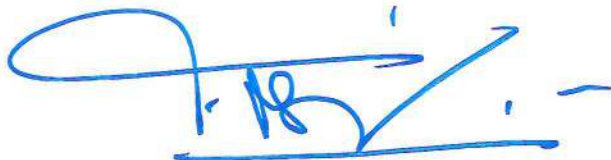
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Disamping itu, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juli 2022  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi  
Sekretaris Jenderal,



Taufik Madjid, S.Sos, M.Si  
NIP 19710701 199903 1 013

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	74
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	89
F. Pengungkapan Penting Lainnya	95
Lampiran dan Daftar	111



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2022 Semester I berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 30 Juli 2022

Pt. Inspektur Jenderal,



Ir. Eko Sri Haryanto, M.M.

NIP. 19630421 199009 1 001



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 30 Juli 2022

Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

Republik Indonesia,



Abdul Halim Iskandar

**RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022 Semester 1 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.458.784.550,00. Realisasi Belanja per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.037.686.078.850,00 atau mencapai 33% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.116.640.354.000,00.

**2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2022. Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.810.197.078.076,56 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp248.498.673.894,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.965.375.386.489,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp181.300.030,56; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp596.141.717.663,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas, masing-masing sebesar Rp83.199.839.739,00; dan Rp2.726.997.238.337,56.

**3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp668.664.445,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.073.915.761.086,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.073.247.096.641,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit sebelum Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp6.763.663.060,00 dan

Rp1.066.483.433.581,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp1.066.483.433.581,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp2.763.006.771.618,00. ditambah Defisit-LO sebesar Rp1.066.483.433.581,00, ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp246.406.000,56 dan transaksi antar entitas senilai total Rp1.030.227.294.300,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp2.726.997.238.337,56.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022		% Thd Angg	30 Juni 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1.495.587.000,00	7.458.784.550,00	498,72	3.234.146.324,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.495.587.000,00</b>	<b>7.458.784.550,00</b>	498,72	<b>3.234.146.324,00</b>
<b>BELANJA</b>	B.2				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.2.1	293.270.752.000,00	129.510.132.705,00	44,16	134.581.386.382,00
Belanja Barang	B.2.2	2.800.596.093.000,00	904.261.595.247,00	32,29	842.644.529.088,00
Belanja Modal	B.2.3	22.773.509.000,00	3.914.350.898,00	17,19	4.696.963.013,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.116.640.354.000,00</b>	<b>1.037.686.078.850,00</b>	<b>33,30</b>	<b>981.922.878.483,00</b>

## II. NERACA

### KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NERACA PER 30 Juni 2022 DAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2022	31 DESEMBER 2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	25.182.175.503,00	10.716.000,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	1.552.877.461,00	74.353.492,00
Uang Muka Belanja ( <i>prepayment</i> )	C.3	(1.390.782,00)	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	1.139.911.138,00	1.157.977.401,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan pajak	C.5	(101.857.578,00)	(101.957.578,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.6	1.038.053.560,00	1.056.019.823,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.7	145.767.100,00	145.767.100,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.8	(11.686.710,00)	(11.686.710,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.9	134.080.390,00	134.080.390,00
Piutang dari KUN	C.10	174.850.000,00	-
Persediaan	C.11	200.170.130.075,00	185.453.337.428,00
Persediaan yang belum diregister	C.11.1	20.247.897.687,00	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>248.498.673.894,00</b>	<b>186.728.507.133,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.12	701.074.345.474,00	701.074.345.474,00
Peralatan dan Mesin	C.13	404.577.279.582,00	401.220.950.084,00
Gedung dan Bangunan	C.14	603.103.929.447,00	603.103.929.447,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.15	858.538.687.671,00	857.833.129.797,00
Aset Tetap Lainnya	C.16	115.537.418.571,00	115.537.418.571,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.17	18.807.755.884,00	17.670.622.284,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.18	(740.758.369.997,00)	(725.372.452.628,00)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.19	4.494.339.857,00	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.965.375.386.489,00</b>	<b>1.971.067.943.029,00</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.20	183.600.174,00	30.714.287,00
Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.21	(2.300.143,44)	(1.535.714,00)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.22	181.300.030,56	29.178.573,00
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>181.300.030,56</b>	<b>29.178.573,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.23	9.312.634.004,00	9.304.684.004,00
Aset Lain-Lain	C.24	1.428.971.979.371,00	1.428.971.979.371,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(842.142.895.712,00)	(827.967.413.591,00)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>596.141.717.663,00</b>	<b>610.309.249.784,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.810.197.078.076,56</b>	<b>2.768.134.878.519,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	42.680.598.088,00	4.356.743.309,00
Utang yang Belum Ditagihkan	C.27	14.532.717.272,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.28	759.320.242,00	759.320.242,00
Uang Muka dari KPPN	C.29	25.182.175.503,00	10.716.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.30	45.028.634,00	1.327.350,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>83.199.839.739,00</b>	<b>5.128.106.901,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>83.199.839.739,00</b>	<b>5.128.106.901,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.31	2.726.997.238.337,56	2.763.006.771.618,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>2.726.997.238.337,56</b>	<b>2.763.006.771.618,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2.810.197.078.076,56</b>	<b>2.768.134.878.519,00</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2022	30 JUNI 2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	668.664.445,00	1.140.776.005,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>668.664.445,00</b>	<b>1.140.776.005,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	150.505.958.104,00	134.581.386.382,00
Beban Persediaan	D.3	4.757.069.303,00	6.508.921.909,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	805.267.132.904,00	721.461.774.968,00
Beban Pemeliharaan	D.5	18.083.353.889,00	11.257.196.994,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	63.190.848.939,00	44.300.177.471,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	2.460.221.314,00	22.304.446.573,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	29.651.276.633,00	78.945.897.806,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(100.000,00)	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.073.915.761.086,00</b>	<b>1.019.359.802.103,00</b>
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.073.247.096.641,00)	(1.018.219.026.098,00)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		265.310.578,00	(2.813.412.517,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		265.310.578,00	98.055.887,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			2.911.468.404,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.498.352.482,00	1.993.314.432,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.499.852.482,00	1.993.314.432,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.500.000,00	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10	6.763.663.060,00	(820.098.085,00)
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(1.066.483.433.581,00)</b>	<b>(1.019.039.124.183,00)</b>
Pos Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	D.10	<b>(1.066.483.433.581,00)</b>	<b>(1.019.039.124.183,00)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 2021**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	2.763.006.771.618,00	2.739.050.841.674,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.066.483.433.581,00)	(1.019.039.124.183,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3.1	-	-
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>		<b>246.606.000,56</b>	<b>20.946.400.788,00</b>
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	(11.000.000,00)	(3.040.945.684,00)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.6	98.484.543,00	24.181.787.941,00
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	159.121.457,56	(194.441.469,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.030.227.294.300,00	978.743.566.597,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(36.009.533.280,44)	(19.349.156.798,00)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>2.726.997.238.337,56</b>	<b>2.719.701.684.876,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yakni:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang

pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Untuk mewujudkan NAWACITA, khususnya Cita ke-3 yaitu: “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, terdapat target sasaran strategis tahun 2020 sampai dengan 2024 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu:

- a. Berkembangnya status pembangunan desa menjadi desa mandiri;
- b. Meningkatnya status perkembangan kawasan Perdesaan;
- c. Penurunan angka kemiskinan di pedesaan
- d. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)
- e. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desma)
- f. Meningkatnya investasi di Perdesaan mendukung transformasi ekonomi
- g. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi
- h. Terentaskannya daerah tertinggal
- i. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal
- j. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal
- k. Meningkatnya SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Sebagai entitas pelaporan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan gabungan dari beberapa entitas pelaporan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI), yaitu:

KODE BA ES-1	NAMA ESELON 1
067 02	Inspektorat Jenderal
067 03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan
067 04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
067 06	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
067 07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
067 08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (*)
067 09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
067 10	Sekretariat Jenderal
067.11	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Ket:

(\*) Unit Kerja Eselon 1 yang likuidasi namun masih memiliki saldo

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari 8 UKE 1 dan 1 UKE-1 yang dilikuidasi namun masih terdapat saldo dengan jumlah satker berdasarkan aplikasi e-Rekon adalah sebanyak 104 Satker yang terdiri dari 93 satker aktif dan 11 satker inaktif bersaldo dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode BA ES-1	Nama UKE 1	Total Satker
1	06702	Inspektorat Jenderal	1
2	06703	Ditjen PDP	2
3	06704	Ditjen PEID	6
4	06706	Ditjen PPDT	1
5	06707	Ditjen PPKTrans	72
6	06708	Ditjen PKTrans	10
7	06709	BPSDM	10
8	06710	Setjen	1
9	06711	BPI	1
<b>Total</b>			<b>104</b>

### A.1.2 Kegiatan Prioritas Nasional RKP 2022 Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN I, PN II, PN III, PN V, PN VI.

1. PN I : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pagu anggaran PN I adalah Rp6.890.479.000,00;
2. PN II : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pagu anggaran PN II adalah Rp2.068.019.127.000,00;
3. PN III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pagu anggaran PN III adalah Rp108.900.484.000,00;
4. PN V : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pagu anggaran PN V adalah Rp20.000.000.000,00
5. PN VI : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pagu anggaran PN VI adalah Rp9.374.736.000,00.

Untuk capaian kegiatan Prioritas Nasional RKP 2022 pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per rincian output terlampir di lampiran.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Semester 1 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Ekuitas.

SAI terdiri dari dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Dalam penerapannya baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan (GLP).

Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker menggunakan Aplikasi SAKTI modul persediaan, aset tetap, dan modul GLP dan terekonsiliasi di Aplikasi MONSAKTI, Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian disusun dengan mengunduh dari Aplikasi MONSAKTI. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022 Semester 1 berpedoman pada:

- Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- Mulai tahun 2016 sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-5568/PB/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pedoman Rekonsiliasi tidak lagi dilakukan proses Rekonsiliasi antara UAPA dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Proses rekonsiliasi hanya dilakukan oleh satker dengan KPPN setempat;
- Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-27/PB/PB.6/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal Penyelesaian Data BMN Anomali Dalam Rangka Migrasi Data ke SAKTI;
- Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-29/PB/PB.6/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

- Semester I Tahun 2022 serta pelaksanaan Rekonsiliasi;
- Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-30/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Penyelesaian Data Aset Tetap/Aset Lainnya Anomali Dalam Rangka Migrasi Data ke SAKTI;
  - Surat Edaran Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-73/PB.6/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Penyesuaian Batas Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2022;

### **A.3. Basis Akuntansi**

*Basis  
Akuntansi*

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

*Dasar  
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

##### *Kebijakan Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 Semester 1 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

##### **(1) Pendapatan- LRA**

##### *Pendapatan-LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2) Pendapatan- LO***Pendapatan-LO*

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang diakui setelah hasil produksi terjual;
  - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja***Belanja*

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau

- Beban* potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  - Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **(5) Aset**

*Aset* Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

#### **a. Aset Lancar**

- Aset Lancar*
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
  - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
  - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a). Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
    - b). Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat

direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Adapun perhitungan penyisihannya sesuai dengan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara adalah:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengatur bahwa persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) dimana barang yang masuk

terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar.

### **b. Aset Tetap**

#### *Aset Tetap*

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Semester 1* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

### **c. Penyusutan Aset Tetap**

#### *Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
  - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa manfaat. Aset Tetap Renovasi (ATR) adalah asset yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi asset yang bukan milik satker. Aset yang direnovasi dapat berupa Gedung dan Bangunan milik satker lain, Kendaraan milik satker lain maupun BMN Lainnya milik satker lain. (PMK Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat).
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

*Piutang Jangka Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

*Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat

neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6) Kewajiban

### *Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### **(7) Ekuitas**

#### *Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan per 30 Juni 2022, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dengan pagu awal sebesar Rp3.104.638.678.000,00 menjadi Rp3.116.640.354.000,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

Penambahan anggaran tersebut terdiri dari program INEY (*Investing in Nutrition and Early Years Project*) sebesar Rp10.736.546.000,00 sesuai surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-167/AG/AG.4/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi TA 2022 (Revisi III) dan program TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu) sebesar Rp3.515.762.000,00 sesuai Surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-239/AG/AG.4/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tambahan *Automatic Adjustment* Belanja dan Revisi Lainnya pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi TA 2022.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Perubahan Anggaran Setelah Revisi  
Per Jenis Pendapatan dan Jenis Belanja  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	30 Juni 2022		
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	KENAIKAN / PENURUNAN
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	1.495.587.000,00	1.495.587.000,00	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.495.587.000,00</b>	<b>1.495.587.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>			
Belanja Pegawai	297.466.352.000,00	293.270.752.000,00	(4.195.600.000,00)
Belanja Barang	2.795.147.918.000,00	2.800.596.093.000,00	5.448.175.000,00
Belanja Modal	12.024.404.000,00	22.773.509.000,00	10.749.105.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.104.638.674.000,00</b>	<b>3.116.640.354.000,00</b>	<b>12.001.680.000,00</b>

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan belanja pegawai sebesar Rp4.195.600.000,00 yang terdiri atas pengurangan anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp5.553.166.000,00; pengurangan anggaran belanja lembur sebesar Rp59.484.000,00; serta penambahan anggaran belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito sebesar Rp1.417.050.000,00.

Penambahan pagu belanja barang sebesar Rp5.448.175.000,00 terdiri atas penambahan anggaran Belanja Barang Operasional sebesar Rp7.040.627.000,00; penambahan anggaran Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp3.721.437.000,00; pengurangan anggaran Belanja Barang Persediaan sebesar Rp335.572.000,00; pengurangan anggaran Belanja Jasa sebesar Rp23.610.267.000,00; penambahan anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp817.289.000,00; penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp25.250.810.000,00; pengurangan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp143.380.000,00; pengurangan anggaran Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp4.174.483.000,00; pengurangan anggaran Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar Rp3.157.631.000,00; serta penambahan anggaran Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat

sebesar Rp39.345.000,00.

Penambahan Belanja Modal sebesar Rp10.899.038.000,00 terdiri atas penambahan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.687.804.000,00; pengurangan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.837.737.000,00; serta penambahan anggaran Belanja Modal Lainnya sebesar Rp10.899.038.000,00.

Adapun rincian Perubahan Anggaran Belanja Setelah Revisi per Program per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja Per Program  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Program	Anggaran Belanja Semula	Anggaran Belanja Setelah Revisi
WA	Program Dukungan Manajemen	705.073.399.000,00	707.914.655.000,00
CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.399.565.275.000,00	2.408.725.699.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.104.638.674.000,00</b>	<b>3.116.640.354.000,00</b>

Sumber dana program kegiatan berasal dari rupiah murni, pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri. Adapun rincian perubahan revisi anggaran belanja berdasarkan sumber dana dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja  
Berdasarkan Sumber Dana*

*Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 Juni 2022		
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	KENAIKAN (PENURUNAN) ANGGARAN BELANJA
Rupiah Murni	2.756.470.674.000,00	2.754.220.046.000,00	(2.250.628.000,00)
Pinjaman Luar Negeri	344.000.000.000,00	344.000.000.000,00	-
Hibah Luar Negeri	4.168.000.000,00	18.420.308.000,00	14.252.308.000,00
Hibah Langsung Luar Negeri	-	-	-
<b>Jumlah Anggaran Belanja</b>	<b>3.104.638.674.000,00</b>	<b>3.116.640.354.000,00</b>	<b>12.001.680.000,00</b>

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana pinjaman luar negeri sebesar Rp344.000.000.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program *Institutional Strengthening for Improved Village*

- Service Delivery*/Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Ditjen PDP sebesar Rp40.000.000.000,00 dengan lender *World Bank*;
2. Program *Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery*/Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPSDM yang memiliki pagu sebesar Rp69.000.000.000,00;
  3. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Sekretariat Jenderal dengan pagu anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00;
  4. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPI dengan pagu anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00;
  5. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang sumber pendanaannya adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui IFAD pada Ditjen PEI-DDTT. Program TEKAD ini menysasar pada 5 (lima) provinsi yaitu Maluku Utara, Maluku, NTT, Papua dan Papua Barat. Tahun Anggaran 2021 dari Pinjaman Luar Negeri pada kegiatan TEKAD ini memiliki anggaran pagu belanja sebesar Rp200.000.000.000,00.

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana hibah luar negeri sebesar Rp18.420.308.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program *Investing In Nutrition Early Years* (INEY) di Ditjen PDP dengan tujuan memfasilitasi desa dalam mendukung pelaksanaan intervensi sensitif dan intervensi spesifikasi serta terjadinya konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa. Tahun 2022 Hibah Luar Negeri (INEY) sebesar Rp10.736.546.000,00;
2. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang sumber pendanaannya adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui IFAD. Tahun Anggaran 2022 Hibah Luar Negeri pada kegiatan TEKAD ini memiliki anggaran pagu belanja sebesar

Rp7.683.762.000,00.

### B.1 Pendapatan

Realisasi  
Pendapatan  
Rp7.458.784.550,00

Realisasi Pendapatan Negara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp7.458.784.550,00 atau mencapai 499% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.495.587.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2022 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian Akun	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Realisasi Pendapatan
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	255.572.920,00	-
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	247.253.003,00	-
3	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	18.057.575,00	-
4	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.495.587.000,00	361.461.982,00	24,17
5	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	7.000.000,00	-
6	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	5.191.658,00	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	176.249.069,00	-
8	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	5.936.419.759,00	-
9	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	262.702.354,00	-
10	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	-	103.876.000,00	-
11	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	39.105.300,00	-
12	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	45.894.930,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.495.587.000,00</b>	<b>7.458.784.550,00</b>	<b>498,72</b>

Realisasi Pendapatan Per 30 Juni 2022 sebagian besar berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2022

dibandingkan dengan 30 Juni 2021 terdapat kenaikan sebesar 130,63 persen. Kenaikan pendapatan ini disebabkan oleh adanya banyaknya pengembalian atas temuan belanja TAYL.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan  
30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	882.345.480,00	911.316.939,00	(3,18)
Pendapatan Jasa Lainnya	-	126.610.098,00	(100,00)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	7.000.000,00	2.008.358,00	248,54
Pendapatan Denda	5.191.658,00	17.598.691,00	(70,50)
Pendapatan Lain-lain	6.564.247.412,00	2.176.612.238,00	201,58
<b>Jumlah</b>	<b>7.458.784.550,00</b>	<b>3.234.146.324,00</b>	<b>130,63</b>

Realisasi Anggaran Pendapatan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Per 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Realisasi Anggaran Pendapatan Pada UKE-1  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi	% Realisasi Anggaran
067.02	Inspektorat Jenderal	-	25.368.693,00	-
067.03	Ditjen PDP	-	439.117.334,00	-
067.04	Ditjen PEID	-	1.865.180.775,00	-
067.06	Ditjen PPDT	-	844.430.127,00	-
067.07	Ditjen PPKTrans	-	1.210.131.489,00	-
067.09	BPSDM	-	901.955.924,00	-
067.10	Sekretariat Jenderal	1.495.587.000,00	1.045.734.669,00	69,92
067.11	BPI	-	1.126.865.539,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.495.587.000,00</b>	<b>7.458.784.550,00</b>	<b>498,72</b>

Rincian Jenis Pendapatan sesuai Akun Pendapatan 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Jenis Pendapatan Sesuai Akun  
30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

KODE AKUN	URAIAN	30 JUN 2022	30 JUN 2021	% NAIK (TURUN)
	<b>Pendapatan PNBP Lainnya</b>			
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha			
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	255.572.920,00	242.001.790,00	5,61
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	247.253.003,00	98.055.887,00	152,16
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	18.057.575,00	-	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	361.461.982,00	571.259.262,00	(36,73)
4256	Pendapatan Jasa Lainnya			
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	126.610.098,00	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan			
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	8.358,00	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	7.000.000,00	2.000.000,00	250,00
4257	Pendapatan Denda			
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	5.191.658,00	17.598.691,00	(70,50)
4259	Pendapatan Lain-Lain			
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	176.249.069,00	24.926.521,00	607,07
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	5.936.419.759,00	1.909.831.883,00	210,83
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	262.702.354,00	36.426.028,00	621,19
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	39.105.300,00	22.130.000,00	76,71
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	103.876.000,00	-	-
425931	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	1.497.207,00	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	45.894.930,00	181.800.599,00	(74,76)
	<b>Jumlah</b>	<b>7.458.784.550,00</b>	<b>3.234.146.324,00</b>	<b>130,63</b>

## B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi per 30 Juni 2022 sebesar Rp1.037.686.078.850,00 atau 33,30 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.116.640.354.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 JUN 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	293.270.752.000,00	129.690.383.185,00	44,22
Belanja Barang	2.800.596.093.000,00	904.997.589.660,00	32,31
Belanja Modal	22.773.509.000,00	3.914.350.898,00	17,19
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>3.116.640.354.000,00</b>	<b>1.038.602.323.743,00</b>	<b>33,32</b>
Pengembalian Belanja	-	916.244.893,00	-
<b>Total Belanja</b>	<b>3.116.640.354.000,00</b>	<b>1.037.686.078.850,00</b>	<b>33,30</b>

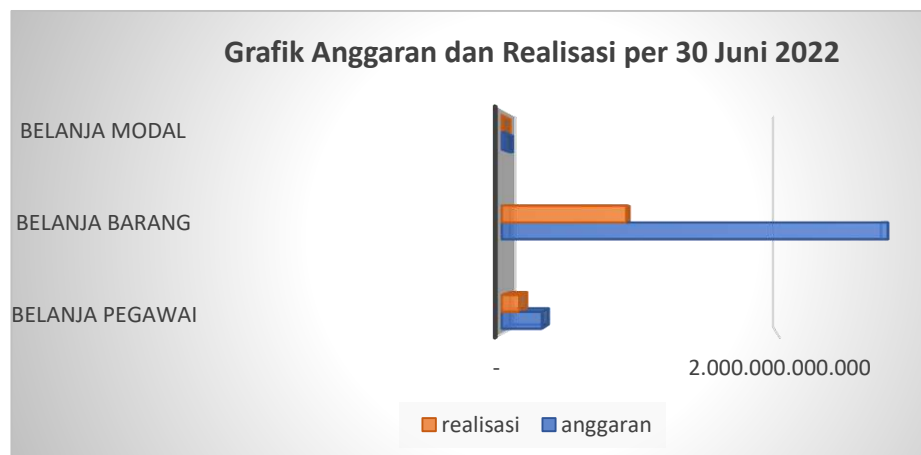
*Realisasi Belanja  
Rp1.037.686.078.850,00*

Terdapat Pengembalian Belanja sebesar Rp916.244.893,00

berasal dari:

1. Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp35.757.700,00;
2. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp192.308,00;
3. Pengembalian Belanja Tunjangan SUami/Istri PNS sebesar Rp1.000.000,00;
4. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS sebesar Rp43.795.000,00;
5. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp3.240.495,00;
6. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp8.880.995,00;
7. Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) sebesar Rp87.383.984,00;
8. Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp1.527.000,00;
9. Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp5.400.000,00;
10. Pengembalian Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp588.223.920,00;
11. Pengembalian Belanja Jasa Profesi sebesar Rp2.895.000,00;
12. Pengembalian Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp21.961.462,00;
13. Pengembalian Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp15.000,00;
14. Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp87.381.431,00;
15. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp150.000,00;
16. Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri sebesar Rp28.440.800,00;

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan Rincian Anggaran dan Realisasi belanja berdasarkan program Per 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Belanja Berdasarkan Program  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Program	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
WA	Program Dukungan Manajemen	707.914.655.000,00	281.253.847.625,00
CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.408.725.699.000,00	756.432.231.225,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.116.640.354.000,00</b>	<b>1.037.686.078.850,00</b>

Adapun realisasi belanja berdasarkan sumber dana kegiatan pada 30 Juni 2022 di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Belanja Berdasarkan Sumber Dana  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Jenis Sumber Dana	30 Juni 2022		% Realisasi
	Anggaran	Realisasi	
Rupiah Murni	2.754.220.046.000,00	985.535.423.551,00	35,78
Pinjaman Luar Negeri	344.000.000.000,00	51.769.649.299,00	15,05
Hibah Luar Negeri	18.420.308.000,00	381.006.000,00	2,07
<b>JUMLAH</b>	<b>3.116.640.354.000,00</b>	<b>1.037.686.078.850,00</b>	<b>33,30</b>

Realisasi Belanja per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,68 persen dibandingkan Tahun 2021. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Netto per jenis Belanja Per 30

Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Netto per jenis Belanja  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	REALISASI	REALISASI	KENAIKAN (PENURUNAN) %
	30 JUN 2022	30 JUN 2021	
Belanja Pegawai	129.510.132.705,00	134.581.386.382,00	(3,77)
Belanja Barang	904.261.595.247,00	842.644.529.088,00	7,31
Belanja Modal	3.914.350.898,00	4.696.963.013,00	(16,66)
<b>Jumlah</b>	<b>1.037.686.078.850,00</b>	<b>981.922.878.483,00</b>	<b>5,68</b>

### **B.2.1 Belanja Pegawai**

*Belanja Pegawai  
Rp129.510.132.705,00*

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp129.510.132.705,00 dan Rp134.581.386.382,00 atau terjadi penurunan sebesar 3,77 persen dari tahun 2021.

Realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2022 mencapai 44,16 persen dari anggaran belanja sebesar Rp293.270.752.000,00. Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Per 30 Juni 2022 masing-masing Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per UKE-1  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Eselon I	Estimasi Anggaran	Realisasi	% Realisasi
067.02	Inspektorat Jenderal	20.612.928.000,00	9.863.347.349,00	47,85
067.03	Ditjen PDP	30.098.101.000,00	13.933.406.455,00	46,29
067.04	Ditjen PEID	30.457.039.000,00	12.682.708.150,00	41,64
067.06	Ditjen PPDT	28.023.424.000,00	11.303.694.790,00	40,34
067.07	Ditjen PPKTrans	40.078.509.000,00	16.743.942.764,00	41,78
067.09	BPSDM	64.159.256.000,00	29.829.174.376,00	46,49
067.10	Sekretariat Jenderal	52.344.520.000,00	23.237.672.390,00	44,39
067.11	BPI	27.496.975.000,00	11.916.186.431,00	43,34
	<b>JUMLAH</b>	<b>293.270.752.000,00</b>	<b>129.510.132.705,00</b>	<b>44,16</b>

Perbandingan rincian realisasi Belanja Pegawai Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	REALISASI 30 Jun 2022	REALISASI 30 Jun 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	72.241.680.572,00	80.562.997.639,00	(10,33)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	173.577.500,00	262.254.200,00	(33,81)
Belanja Lembur	376.372.000,00	222.907.000,00	68,85
Belanja Tunjangan Khusus & Pegawai Transito	56.898.753.113,00	53.590.461.768,00	6,17
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>129.690.383.185,00</b>	<b>134.638.620.607,00</b>	<b>(3,68)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	180.250.480,00	57.234.225,00	214,93
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>129.510.132.705,00</b>	<b>134.581.386.382,00</b>	<b>(3,77)</b>

Kenaikan belanja lembur dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 68,85 persen disebabkan adanya penurunan pandemi COVID-19 dan kebijakan WFO 100%.

### B.2.2 Belanja Barang

*Belanja Barang  
Rp904.261.595.247,00*

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 904.261.595.247,00 dan Rp842.644.529.088,00 atau terjadi kenaikan sebesar 7,31 persen dibandingkan tahun 2021. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022 mencapai 32,29 persen dari anggaran belanja barang Tahun 2021 sebesar Rp2.800.596.093.000,00.

Belanja Barang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 30 Juni 2022 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Barang pada UKE-I  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Eselon I	Estimasi Anggaran	Realisasi	Realisasi %
067.02	Inspektorat Jenderal	30.180.165.000,00	7.851.170.384,00	26,01
067.03	Ditjen PDP	186.756.532.000,00	19.921.193.367,00	10,67
067.04	Ditjen PEID	293.191.971.000,00	49.025.504.032,00	16,72
067.06	Ditjen PPDT	54.567.224.000,00	15.486.210.028,00	28,38
067.07	Ditjen PPKTrans	271.991.107.000,00	62.568.294.515,00	23,00
067.09	BPSDM	1.729.370.707.000,00	663.173.944.371,00	38,35
067.10	Sekretariat Jenderal	163.211.622.000,00	63.349.841.664,00	38,81
067.11	BPI	71.326.765.000,00	22.885.436.886,00	32,09
<b>JUMLAH</b>		<b>2.800.596.093.000,00</b>	<b>904.261.595.247,00</b>	<b>32,29</b>

Adapun perbandingan Belanja Barang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Per 30 Juni 2022 dan 2021 per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Barang per Jenis Belanja  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2022	REALISASI 30 JUN 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	47.571.274.200,00	39.906.341.250,00	19,21
Belanja Barang Non Operasional	20.857.948.055,00	18.057.087.345,00	15,51
Belanja Barang Persediaan	8.220.726.506,00	7.669.924.542,00	7,18
Belanja Jasa	716.533.976.085,00	663.528.097.034,00	7,99
Belanja Pemeliharaan	17.007.843.666,00	11.466.725.894,00	48,32
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	59.348.151.810,00	44.375.329.012,00	33,74
Belanja Perjalanan Luar negeri	527.830.808,00	-	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masv	11.000.495.744,00	23.254.178.281,00	(52,69)
Belanja Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	22.926.442.786,00	18.668.747.932,00	22,81
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	1.002.900.000,00	15.825.000.000,00	(93,66)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>904.997.589.660,00</b>	<b>842.751.431.290,00</b>	<b>7,39</b>
Pengembalian Belanja	735.994.413,00	106.902.202,00	<b>588,47</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>904.261.595.247,00</b>	<b>842.644.529.088,00</b>	<b>7,31</b>

Adapun belanja barang untuk penanganan Pandemi Covid-19 oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode Akun	Uraian Akun	Estimasi Anggaran	Realisasi	Realisasi %
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	7.514.890.000,00	2.873.210.506,00	38,23
521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	1.201.841.000,00	78.739.000,00	6,55
521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	1.500.000,00	-	-
522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	7.750.927.000,00	1.180.293.499,00	15,23
<b>JUMLAH</b>		<b>16.469.158.000,00</b>	<b>4.132.243.005,00</b>	<b>25,09</b>

Akun-akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 ini dianggarkan sesuai surat dirjen perbendaharaan No. S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Akun-akun khusus ini digunakan oleh Satker-Satker di lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk Penanganan Covid (PC).

Adapun rincian realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan akun khusus Penanganan Pandemi Covid-19 pada masing-masing Unit Kerja Eselon I per 30 Juni 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

*Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19 dengan akun khusus pada masing-masing UKE-I Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

UKE-I	521131	521241	521841	522192
Ijjen	12.137.411,00			61.695.000,00
PDP	944.446,00	-		40.676.029,00
PEID	728.008.881,00	-		409.718.227,00
PPDT	-	38.490.000,00		71.560.881,00
PPKTrans	1.118.049.313,00	28.026.000,00		57.429.344,00
BPSDM	692.606.884,00	12.223.000,00		185.504.488,00
Sekjen	67.539.571,00	-		264.856.617,00
BPI	144.684.000,00			88.852.913,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.873.210.506,00</b>	<b>78.739.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.180.293.499,00</b>

Berdasarkan tabel belanja barang untuk penanganan Pandemi Covid-19 oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut

- Realisasi Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) telah mencapai 38,23 persen per 30 Juni 2022 digunakan untuk pembelian masker, *handsanitizer*, penyemprotan disinfektan, pembelian vitamin;
- Realisasi Belanja Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) telah mencapai 6,55 persen per 30 Juni 2022 digunakan untuk pembelian pulsa atau paket data

internet pegawai rutin per bulan, biaya konsumsi petugas penyemprot;

- Realisasi belanja Barang Persediaan-penanganan Pandemi Covid-19 (521841) telah mencapai 0 persen.
- Realisasi Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) telah mencapai 15,23 persen per 30 Juni 2022 digunakan untuk *Swab Test* antigen, *swab Test PCR*, Penyemprotan disinfektan dengan pihak ketiga, dan Honor Narasumber dan moderator video *conference* pada seluruh satker.

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.914.350.898,00 dan Rp4.696.963.013,00 atau mengalami penurunan sebesar 16,66 persen dibandingkan dengan Tahun 2021. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Belanja Modal*  
Rp3.914.350.898,00

Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2022 mencapai 17,19 persen dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp22.773.509.000,00.

Adapun Rincian Belanja Modal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi per 30 Juni 2022 pada masing-masing Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Modal per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Unit Kerja Eselon I	Anggaran	Realisasi	%Realisasi Anggaran
067.02	Inspektorat Jenderal	900.000.000,00	819.540.000,00	91,06
067.03	Ditjen PDP	3.749.038.000,00	24.862.890,00	0,66
067.04	Ditjen PEID	405.000.000,00	-	-
067.06	Ditjen PPDT	-	-	-
067.07	Ditjen PPKTrans	1.438.598.000,00	848.801.500,00	59,00
067.09	BPSDM	11.210.542.000,00	316.408.000,00	2,82
067.10	Sekretariat Jenderal	4.645.889.000,00	1.717.048.508,00	36,96
067.11	BPI	424.442.000,00	187.690.000,00	44,22
	<b>JUM LAH</b>	<b>22.773.509.000,00</b>	<b>3.914.350.898,00</b>	<b>17,19</b>

Adapun Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Per Jenis Belanja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Per 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2022	REALISASI 30 JUN 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.914.350.898,00	1.499.683.675,00	161,01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	2.790.561.500,00	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	-	406.717.838,00	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.914.350.898,00</b>	<b>4.696.963.013,00</b>	<b>(16,66)</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.914.350.898,00</b>	<b>4.696.963.013,00</b>	<b>- 16,66</b>

### **B.2.3.1 Belanja Modal Tanah**

*Belanja Modal Tanah  
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat anggaran belanja modal tanah pada tahun 2022.

### **B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

*Belanja Modal Peralatan  
dan Mesin  
Rp3.914.350.898,00*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.914.350.898,00 dan Rp1.499.683.675,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 161 persen dibandingkan 30 Juni 2021.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 30 Juni 2022 mencapai 44,12 persen dari anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp8.872.128.000,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 30 Juni 2022 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022*

(Dalam Rupiah)

Kode	Unit Kerja Eselon I	Anggaran	Realisasi	%Realisasi Anggaran
067.02	Inspektorat Jenderal	900.000.000,00	819.540.000,00	91,06
067.03	Ditjen PDP	1.000.000.000,00	24.862.890,00	2,49
067.04	Ditjen PEID	405.000.000,00	-	-
067.07	Ditjen PPKTrans	1.434.598.000,00	848.801.500,00	59,17
067.09	BPSDM	862.199.000,00	316.408.000,00	36,70
067.10	Sekretariat Jenderal	3.845.889.000,00	1.717.048.508,00	44,65
067.11	BPI	424.442.000,00	187.690.000,00	44,22
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.872.128.000,00</b>	<b>3.914.350.898,00</b>	<b>44,12</b>

Realisasi belanja modal peralatan mesin tersebut merupakan realisasi anggaran belanja modal (532111) sebagian besar untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Operasional Kantor seperti alat elektronik, *furniture* untuk mendukung kegiatan operasional pegawai.

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi  
Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2022	REALISASI 30 JUN 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.914.350.898,00	1.499.683.675,00	161,01
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.914.350.898,00</b>	<b>1.499.683.675,00</b>	<b>161,01</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.914.350.898,00</b>	<b>1.499.683.675,00</b>	<b>161,01</b>

### **B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp00,00. Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2022 mencapai 0 persen dari anggaran belanja sebesar Rp968.343.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada 30

Juni 2022 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi  
Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Unit Kerja Eselon I	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
067.09	BPSDM	268.343.000,00	-	-
067.10	Sekretariat Jenderal	700.000.000,00	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>968.343.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.790.561.500,00. Tidak terdapat anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2022.

*Belanja Modal JIJ  
Rp0,00*

**B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp406.717.838,00. Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2022 mencapai 0 persen dari anggaran Belanja Modal Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp12.33.038.000,00. Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi per 30 Juni 2022 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
067.03	Ditjen PDP	2.749.038.000	-	0,00
067.07	Ditjen PPKTrans	4.000.000	-	0,00
067.09	BPSDM	10.080.000.000,00	-	0,00
067.10	Sekretariat Jenderal	100.000.000,00	-	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>12.933.038.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA****ASET LANCAR**

Nilai Aset Lancar Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp248.498.673.894,00 dan Rp186.728.507.133,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

*Rincian Aset Lancar  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

No.	Aset Lancar	30 Juni 2022	31 Desember 2021
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	25.182.175.503,00	10.716.000,00
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	1.552.877.461,00	74.353.492,00
3	Uang Muka Belanja (prepayment)	(1.390.782,00)	-
4	Piutang Bukan Pajak	1.139.911.138,00	1.157.977.401,00
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	(101.857.578,00)	(101.957.578,00)
6	Piutang Bukan Pajak (Netto)	1.038.053.560,00	1.056.019.823,00
7	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	145.767.100,00	145.767.100,00
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(11.686.710,00)	(11.686.710,00)
9	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	134.080.390,00	134.080.390,00
10	Piutang Dari KUN	174.850.000,00	-
11	Persediaan	200.170.130.075,00	185.453.337.428,00
12	Persediaan yang Belum Diregister	20.247.897.687,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>248.498.673.894,00</b>	<b>186.728.507.133,00</b>

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp25.182.175.503,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau

belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp25.182.175.503,00 dan Rp10.716.000,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 per unit kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Unit Kerja	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Itjen	300.000.000,00	-
Dijten PDP	4.018.512.835,00	-
Ditjen PEID	742.756.000,00	-
Ditjen PDT	300.000.000,00	-
Ditjen PPKTras	6.329.504.200,00	-
BPSDM	12.891.402.468,00	-
Setjen	300.000.000,00	-
BPI	300.000.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>25.182.175.503,00</b>	<b>-</b>

### C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp1.552.877.461,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.552.877.461,00 dan Rp74.353.492,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Rincian Kas Lainnya dan Setara per Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Unit Kerja	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Ditjen PDP	-	180.400,00
Ditjen PEID	106.141.729,00	24.233.200,00
Ditjen PPKTrans	290.887.425,00	-
BPSDM	808.441.391,00	49.939.892,00
Setjen	347.406.916,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.552.877.461,00</b>	<b>74.353.492,00</b>

### C.3 Uang Muka Belanja (Prepayment)

*Uang Muka Belanja  
(Prepayment)  
(Rp1.390.782,00)*

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar (Rp1.390.782,00) dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Saldo Uang Muka Belanja (Prepayment) Kemendesa PD TT terdapat pada Ditjen PPKTrans. Uang Muka Belanja (Prepayment) ini merupakan pengembalian Belanja Pegawai tahun berjalan tetapi ada kesalahan akun dalam penyeteroran. Akun yang seharusnya adalah 425911 namun dicatat sebagai akun 425999.

### C.4 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak  
Rp1.139.911.138,00*

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.139.911.138,00 dan Rp1.157.977.401,00 yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Ditjen P KP 2Trans	412.718.527,00	410.784.790,00
BPSDM	210.500.000,00	230.500.000,00
Sekretariat Jenderal	516.692.611,00	516.692.611,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.139.911.138,00</b>	<b>1.157.977.401,00</b>

Rincian Piutang Negara Bukan Pajak yang terdapat pada BPSDM Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp230.500.000,00 merupakan Temuan BPK TA 2020 pada satker atas Kurang Volume Hasil Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Layar Film/Film (Videotron) sebesar Rp199.000.000,00 dan Note Book sebesar Rp31.500.000,00 pada BPSDM. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak ketiga diwajibkan untuk membayar pengembalian ke Negara atas Temuan tersebut sebesar Rp230.500.000,00. Namun, sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp20.000.000,00. Sehingga saldo Piutang Negara Bukan Pajak BPSDM per 30 Juni 2022 sebesar Rp210.500.000,00.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PKP2Trans Rp412.718.527,00 sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak  
Ditjen PKP2Trans  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH
1	067.07.350285	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WAJO	112.869.373,00
2	067.07.350307	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWA	127.148.767,00
3	067.07.350450	DINAS KELUARGA SEJAHTERA, MOBDUK DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIMEULEU	542.955,00
4	067.07.350467	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN	1.390.782,00
5	067.07.418191	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SIDRAP	30.887.817,00
6	067.07.419124	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. MUNA	139.878.833,00
<b>Total</b>			<b>412.718.527,00</b>

*Rincian Piutang Bukan Pajak  
Sekretariat Jenderal  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah)*

NAMA SATKER	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Piutang Pujasera, Kantin dan FC Nur Kholiq Masa Kontrak 26/1/2018 s.d. 26/1/2020	465.080.882,00	495.707.270,00
Piutang Pujasera, Kantin Masa Kontrak 1/2/2020 s.d. 1/2/2021	-	65.070.711,00
Piutang Pujasera, Kantin Masa Kontrak 2/2/2021 s.d. 2/2/2022	33.737.562,00	-
Piutang Bagi Hasil PT Ardas Tahun 2020	-	9.661.950,00
Piutang Sewa Gedung dan Bangunan untuk café oleh CV Latere dan Usaha Gita Sabela	17.874.167,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>516.692.611,00</b>	<b>570.439.931,00</b>

Penjelasan Mutasi Piutang Sekjen sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Piutang Pujasera Piutang Pujasera, Kantin dan FC Nur Kholiq Masa Kontrak 26/1/2018 s.d. 26/1/2020; saldo per 2020 adalah sebesar Rp495.707.270,00. Pada Tahun 2021 terdapat jurnal koreksi penambahan pencatatan piutang FC Nur Kholiq sebesar Rp226.287,00 akibat kesalahan perhitungan termin yang awalnya tercatat 3/7/2021 seharusnya 2/1/2021. Selanjutnya selama tahun 2021 terdapat penerimaan pembayaran piutang pujasera dan kantin sebesar Rp20.600.000,00 dan pelunasan piutang FC Nur Kholiq sebesar Rp10.252.675,00. Sehingga saldo akhir Piutang per 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp465.080.882,00;
2. Piutang Pujasera, Kantin Masa Kontrak 1/2/2020 s.d. 1/2/2021. Saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp65.070.711,00. Pada Tahun 2021 terdapat jurnal koreksi penambahan pencatatan piutang sebesar Rp128.646,00 akibat kesalahan pencatatan nominal sewa Pujasera atas nama Moh Ali (Nomor Kontrak 53/UM.01.05/X/2020) dan Wongso (Nomor Kontrak 54/UM.01.05/X/2020) pada tahun 2020 yang awalnya

dicatat Rp3.108.119,00 per satu tahun menjadi Rp3.178.503,00. Selanjutnya terdapat pengakuan piutang tahun 2021 sebesar Rp6.143.405,00. Namun demikian, selama tahun 2021, piutang ini telah dilunasi dengan jumlah sebesar Rp71.342.762,00 sehingga saldo Piutang per 30 Juni 2022 menjadi Rp0,00;

3. Piutang Pujasera, Kantin Masa Kontrak 2/2/2021 s.d. 2/2/2022, saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00. Pada tahun 2021 terdapat pengakuan piutang sebesar Rp70.793.122,00 dan baru dilakukan pelunasan sebesar Rp37.055.560,00. Hal ini menyebabkan saldo Piutang per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp33.737.562,00;
4. Piutang Bagi Hasil PT Ardas Tahun 2020; saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.661.950,00 dan sudah dilakukan pelunasan sebesar Rp9.661.950,00 pada tanggal 11 Mei 2021 dengan nomor NTPN CFE9B2G4UTMRK8MU sehingga saldo Piutang per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0,00
5. Piutang Sewa Gedung dan Bangunan untuk café oleh CV Latere dan Usaha Gita Sabela sebesar Rp17.874.167,00.

### **C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak**

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak (Rp101.857.401,00)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp101.857.401,00) dan (Rp101.957.401,00). Penyisihan piutang tak tertagih-piutang bukan pajak pada masing-masing Unit Kerja Eselon I per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Piutang bukan pajak - per UKE-1  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Ditjen PKP2Trans	2.053.923,00	2.053.923,00
Balilatfo	1.052.500,00	1.152.500,00
Sekretariat Jenderal	98.751.155,00	98.751.155,00
<b>Total</b>	<b>101.857.578,00</b>	<b>101.957.578,00</b>

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Bukan Pajak  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	672.896.519,00	0,50%	3.364.482,60
Kurang Lancar	465.080.882,00	10%	46.508.088,20
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.137.977.401,00</b>		<b>49.872.570,80</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar		0,50%	
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
PPKTrans	1.933.737,00		
Penyisihan Setjen Tahun 2020			51.985.008,00
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>1.139.911.138,00</b>		<b>101.857.578,80</b>

### C.6 Piutang Bukan Pajak (*Netto*)

*Piutang Bukan Pajak  
(netto)  
Rp1.038.053.560,00*

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.038.053.560,00 dan Rp1.056.019.823,00. Nilai Piutang Bukan Pajak (*Netto*) berasal dari selisih Piutang Bukan Pajak (*Bruto*) dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak.

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto)  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Ditjen PKP2Trans	410.664.604,00	408.730.867,00
Balilatfo	209.447.500,00	229.347.500,00
Sekretariat Jenderal	417.941.456,00	417.941.456,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.038.053.560,00</b>	<b>1.056.019.823,00</b>

**C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp145.767.100,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp145.767.100,00 dan Rp145.767.100,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian nilai bagian lancar TP/TGR per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	87.967.100,00	87.967.100,00
Bagian Lancar TGR	57.800.000,00	57.800.000,00
	<b>145.767.100,00</b>	<b>145.767.100,00</b>

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp145.767.100,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Temuan atas hilangnya kendaraan dinas roda 4 atas pegawai dengan inisial RP. Pencatatan atas hilangnya kendaraan dinas roda 4 sesuai dengan atensi temuan hasil audit surat Itjen No.Rhs.232/PW.03.01/VII/2019 pada Ditjen PPKTrans Tanggal 30 Juli 2019. Saldo bagian lancar TGR per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.800.000,00 merupakan piutang yang harus dibayarkan atas temuan

tersebut sesuai dengan *Time Line* di SKTJM dimana untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp22.000.000,00 dan sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp15.000.000,00 dengan akun 425791 (pendapatan penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain) yang disetorkan tanggal bayar 22 Desember 2021. Dengan demikian saldo Bagian Lancar TGR per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp57.800.000,00;

2. Piutang TP di Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Ditjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi 067.08.350463 yang merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 15/HP/XVI/01/2011 dan telah dilakukan jurnal transfer keluar dari 067.08.350463 dan jurnal transfer masuk ke 067.07.350467 di tahun 2021 sebesar Rp87.967.100,00.

### **C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar**

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih – Piutang  
Lancar Lancar  
Rp11.686.710,00*

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.686.710,00 dan Rp11.686.710,00. Estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar  
TP/TGR*

*Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	87.967.100,00	10%	8.796.710,00
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>87.967.100,00</b>	-	<b>8.796.710,00</b>
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
Bagian Lancar TGR Ditjen PPKTrans	57.800.000,00	5%	2.890.000,00
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>145.767.100,00</b>	-	<b>11.686.710,00</b>

### C.9 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

Bagian Lancar Tagihan (Netto)  
Rp134.080.390,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp134.080.390,00 dan Rp134.080.390,00.

*Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)*

*Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

No.	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Bersih
1	Lancar	-	-	-
2	Kurang Lancar	145.767.100,00	11.686.710,00	134.080.390,00
3	Diragukan	-	-	-
4	Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>145.767.100,00</b>	<b>11.686.710,00</b>	<b>134.080.390,00</b>

### C.10 Piutang Dari KUN

Piutang Dari KUN  
Rp174.850.000,00

Saldo Piutang dari KUN per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing sebesar Rp174.850.000,00. Piutang Dari KUN ini terbagi menjadi 2 akun yaitu Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima sebesar Rp5.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima sebesar Rp169.850.000,00 yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Pendudukan Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan karena satker telah menginput SPP

pada SAKTI Modul bendahara padahaln SPM/SP2Dnya belum terbit.

### C.11 Persediaan

Persediaan  
Rp200.170.130.075,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp200.170.130.075,00 dan Rp185.453.337.428,00. Adapun nilai persediaan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkup KDPDPTT per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

*Rincian Persediaan pada Unit Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	84.279.000,00	25.948.400,00
067.03	Ditjen PDP	17.888.982.237,00	16.559.540.037,00
067.04	Ditjen PEID	1.440.725.000,00	1.448.858.000,00
067.06	Ditjen PDT	2.450.184.568,00	2.454.991.718,00
067.07	Ditjen PPKTrans	177.209.154.029,00	164.628.017.569,00
067.09	BPSDM	200.913.730,00	62.402.950,00
067.10	Setjen	536.563.411,00	187.828.104,00
067.11	BPI	359.328.100,00	85.750.650,00
<b>JUMLAH</b>		<b>200.170.130.075,00</b>	<b>185.453.337.428,00</b>

Rincian mutasi/perubahan nilai Persediaan per 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Persediaan  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>185.453.337.428,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>25.086.040.126,00</b>
Pembelian	20.567.511.264,00
Reklasifikasi Masuk	4.510.232.862,00
Perolehan Lainnya	3.900.000,00
Hasil Opname Fisik	3.620.000,00
Transfer Masuk	776.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>10.369.247.479,00</b>
Habis Pakai	5.843.338.617,00
Reklasifikasi Keluar	4.510.232.862,00
Reklasifikasi ke Aset	11.000.000,00
Koreksi Kuantitas Kurang	3.900.000,00
Transfer Keluar	776.000,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>200.170.130.075,00</b>

Penjelasan Mutasi Tambah Persediaan berasal dari:

- Pembelian sebesar Rp20.567.511.264,00 yang terdapat pada Itjen sebesar Rp790.457.500,00, Ditjen PDP sebesar Rp2.076.346.432,00, Ditjen PDT sebesar Rp23.963.350,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp13.840.829.574,00, BPSDM sebesar Rp1.787.442.668,00 Setjen sebesar Rp1.739.151.640,00, dan BPI sebesar Rp309.320.100,00
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp4.510.232.862,00 terdapat pada Ditjen PDP sebesar Rp2.272.000,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp4.507.358.862,00, dan BPSDM sebesar Rp602.000,00
- Perolehan Lainnya sebesar Rp3.900.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans
- Hasil Opname Fisik sebesar Rp3.620.000,00 terdapat pada PPKTrans
- Transfer Masuk sebesar Rp776.000,00 terdapat pada BPSDM

Penjelasan Mutasi Kurang Persediaan:

- Pemakaian sebesar Rp5.843.338.617,00 terdapat pada Itjen sebesar Rp732.126.900,00, Ditjen PDP sebesar Rp746.904.232,00, Ditjen PEID sebesar Rp8.133.000,00, Ditjen PDT sebesar Rp28.770.500,00, Ditjen PPKTrans

sebesar Rp1.252.313.114,00, BPSDM sebesar Rp1.648.931.888,00, Setjen Rp1.390.416.333,00 dan BPI sebesar Rp35.742.650,00

- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp4.510.232.862,00 terdapat pada Ditjen PDP sebesar Rp2.272.000,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp4.507.358.862,00, dan BPSDM sebesar Rp602.000,00
- Reklasifikasi Ke Aset sebesar Rp11.000.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans
- Koreksi Kuantitas Kurang sebesar Rp3.900.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans
- Transfer Keluar sebesar Rp776.000,00 terdapat pada BPSDM

Adapun rincian persediaan per akun pada periode 30 Juni 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Persediaan per Akun  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	30 Juni 2022
117111	Barang Konsumsi	1.535.226.725,00
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	195.000,00
117114	Pita Cukai, Materai dan Leges	600.000,00
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	76.790.095.733,00
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	8.741.336.675,00
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	22.867.740.744,00
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	64.200.882.270,00
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	11.449.784.431,00
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	14.413.640.147,00
117141	Bahan Baku	12.000.000,00
117199	Persediaan Lainnya	158.628.350,00
<b>JUMLAH</b>		<b>200.170.130.075,00</b>

**C.11.1 Persediaan Belum Diregister**

*Persediaan Belum  
Diregister*  
Rp20.247.897.687,00

Nilai persediaan yang belum diregister per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.247.897.687,00 dan Rp0,00. Adanya nilai persediaan yang belum diregister per 30 Juni 2022 dikarenakan belanja barang persediaan belum di input pada aplikasi dan akan diproses input pada Semester II.

Adapun rincian persediaan belum diregister pada masing-masing Eselon I per 30 Juni 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

*Rincian Persediaan Belum Diregister  
Pada Unit Eselon I  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022
067.02	Inspektorat Jenderal	180.001.000,00
067.03	Ditjen PDP	992.562.268,00
067.04	Ditjen PEID	500.208.325,00
067.06	Ditjen PDT	2.790.822.893,00
067.07	Ditjen PPKTrans	14.476.306.091,00
067.09	BPSDM	283.523.210,00
067.10	Setjen	378.384.600,00
067.11	BPI	646.089.300,00
<b>JUMLAH</b>		<b>20.247.897.687,00</b>

**ASET TETAP**

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset Tetap pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.968.698.950.289,00 dan Rp1.997.934.495.703,00. Adapun Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

*Rincian Aset Tetap  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah)*

URAIAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Tanah	701.074.345.474,00	701.074.345.474,00	-
Peralatan dan Mesin	404.577.279.582,00	401.220.950.084,00	0,84
Gedung dan Bangunan	603.103.929.447,00	603.103.929.447,00	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	858.538.687.671,00	857.833.129.797,00	0,08
Aset Tetap Lainnya	115.537.418.571,00	115.537.418.571,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.807.755.884,00	17.670.622.284,00	6,44
Akumulasi Penyusutan	(740.758.369.997,00)	(725.372.452.628,00)	2,12
Aset Tetap yang Belum Diregister	4.494.339.857,00	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.965.375.386.489,00</b>	<b>1.971.067.943.029,00</b>	<b>(0,29)</b>

### C.12 Tanah

Tanah  
Rp701.064.345.474.000,  
00

Nilai aset tetap berupa Tanah per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar dan Rp701.064.345.474.000,00 dan Rp701.074.345.474,00. Tidak terdapat kenaikan atau penurunan dibandingkan tahun 31 Desember 2021. Rincian aset Tanah per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tanah per Unit Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Juni 2022	31 Desember 2021	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.09	BPSDM	596.815.490.474,00	596.815.490.474,00	-	0,00%
067.10	Setjen	104.258.855.000,00	104.258.855.000,00	-	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>701.074.345.474,00</b>	<b>701.074.345.474,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Tidak ada mutasi/perubahan saldo Tanah per 30 Juni 2022, hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan saldo Tanah dari 31 Desember 2021 hingga 30 Juni 2022.

Rincian Aset Tanah yang dimiliki Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada masing-masing satker per 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Daftar Aset Tanah pada masing-masing Satker  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

NAMA SATKER	Nilai
Balai Latihan Masyarakat Ambon	876,564,000
BP SDM	83,390,800,000
Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu	172,830,565,000
Balai Besar Pelatihan Masyarakat, PDT & Trans Yogyakarta	68,599,991,000
Balai Pelatihan Masyarakat, PDT & Trans Makassar	86,270,943,474
Balai Pelatihan Masyarakat, PDT & Trans Banjarmasin	41,462,575,000
Balai Pelatihan Masyarakat, PDT & Trans Denpasar	129,778,125,000
Balai Pelatihan Masyarakat, PDT & Trans Pekanbaru	13,595,927,000
Sekretariat Jenderal KDP DTT	104,258,855,000
<b>Jumlah Tanah</b>	<b>701,064,345,474</b>

### C.13 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin  
Rp404.577.279.582,00*

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp404.577.279.582,00 dan Rp401.220.950.084,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp3.356.329.498,00 atau 0,84 persen dibandingkan tahun 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian nilai Peralatan dan Mesin pada Unit Kerja Eselon I lingkup KDP DTT per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Peralatan dan Mesin Menurut Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Inspektorat Jenderal	11.111.035.003,00	10.291.495.003,00	819.540.000,00	7,96%
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	17.937.399.985,00	17.877.916.195,00	59.483.790,00	0,33%
067.04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa	21.289.993.024,00	21.289.993.024,00	-	0,00%
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	27.870.743.592,00	27.870.743.592,00	-	0,00%
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan	80.251.247.285,00	80.245.452.285,00	5.795.000,00	0,01%
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	732.147.090,00	732.147.090,00	-	0,00%
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan	67.123.151.772,00	66.920.513.772,00	202.638.000,00	0,30%
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	125.168.919.451,00	123.087.736.743,00	2.081.182.708,00	1,69%
067.11	Badan Pengembangan dan Informasi	53.092.642.380,00	52.904.952.380,00	187.690.000,00	0,35%
<b>JUMLAH</b>		<b>404.577.279.582,00</b>	<b>401.220.950.084,00</b>	<b>3.356.329.498,00</b>	<b>0,84%</b>

Adapun mutasi nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>401.226.745.084</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>3.517.534.498</b>
Pembelian	3.347.722.098
Koreksi Manual Henti	137.812.400
Reklasifikasi Masuk	32.000.000
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>167.000.000</b>
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	135.000.000
Reklasifikasi Keluar	32.000.000
<b>Saldo Akhir</b>	<b>404.577.279.582</b>
Akumulasi Penyusutan	342.878.134.802
<b>Nilai Buku</b>	<b>61.699.144.780</b>

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin terjadi akibat:

- Pembelian sebesar Rp3.347.722.098,00 yang terdapat pada Itjen sebesar Rp819.540.000,00, Ditjen PDP sebesar Rp59.483.790,00, BPSDM sebesar Rp327.658.000,00, Setjen sebesar Rp1.953.350.308,00, dan BPI sebesar Rp187.690.000,00
- Koreksi Manual Henti sebesar Rp137.812.400,00 terdapat pada BPSDM sebesar Rp9.980.000,00 dan Setjen Rp127.832.400,00
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp32.000.000,00 terdapat pada BPSDM

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin terjadi akibat:

- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp135.000.000,00 terdapat pada BPSDM
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp32.000.000,00 terdapat pada BPSDM

#### **C.14 Gedung dan Bangunan**

*Gedung dan Bangunan  
Rp603.103.929.447,00*

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan bangunan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah Rp603.103.929.447,00 dan Rp603.103.929.447,00. Tidak

terdapat penurunan atau kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

*Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.07	Ditjen PKP2TRans	189.666.210.059,00	189.666.210.059,00	-	0,00%
067.08	Ditjen PKTRans	3.607.709.000,00	3.607.709.000,00	-	0,00%
067.09	BPSDM	131.342.415.739,00	131.342.415.739,00	-	0,00%
067.10	Setjen	278.487.594.649,00	278.487.594.649,00	-	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>603.103.929.447,00</b>	<b>603.103.929.447,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Tidak ada Mutasi Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022, hal ini disebabkan karena tidak ada perubahan saldo Gedung dan Bangunan dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.

### **C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

*Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp858.538.687.671,00*

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp858.538.687.671,00 dan Rp857.833.129.797,00. Terdapat kenaikan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2022 sebesar Rp705.557.874,00 atau 0,08 persen dibandingkan tahun 31 Desember 2021.

Perbandingan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada berikut:

*Rincian Aset Tetap JIJ per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.03	Ditjen PDP	738.709.450,00	738.709.450,00	-	0,00%
067.07	Ditjen PKP2Trans	822.982.267.849,00	822.282.454.975,00	699.812.874,00	0,09%
067.08	Ditjen PKTRans	13.770.764.537,00	13.770.764.537,00	-	0,00%
067.09	BPSDM	13.402.132.593,00	13.402.132.593,00	-	0,00%
067.10	Setjen	1.773.861.292,00	1.768.116.292,00	5.745.000,00	0,32%
067.11	BPI	5.870.951.950,00	5.870.951.950,00	-	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>858.538.687.671,00</b>	<b>857.833.129.797,00</b>	<b>705.557.874,00</b>	<b>0,08%</b>

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 30 Juni 2022 sebagai berikut:

*Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>857.833.129.797</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>705.557.874</b>
Pembelian	705.557.874
<b>Saldo Akhir</b>	<b>858.538.687.671</b>
Akumulasi Penyusutan	318.494.316.137
<b>Nilai Buku Akhir</b>	<b>540.044.371.534</b>

Perubahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan adanya pembelian dari Setjen sebesar Rp5.745.000,00 dan Ditjen PPKTrans satker Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp699.812.874,00

### **C.16 Aset Tetap Lainnya**

*Aset Tetap Lainnya  
Rp115.537.418.571,00*

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp115.537.418.571,00 dan Rp115.537.418.571,00. Tidak terdapat penurunan atau kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya dari 31 Desember 2021. Perbandingan rincian nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Inspektorat Jenderal	49.875.000,00	49.875.000,00	-	0,00%
067.03	Ditjen PDP	409.076.760,00	409.076.760,00	-	0,00%
067.04	Ditjen PEID	466.516.450,00	466.516.450,00	-	0,00%
067.06	Ditjen PDT	1.878.310.000,00	1.878.310.000,00	-	0,00%
067.07	Ditjen PKP2Trans	111.364.180.813,00	111.364.180.813,00	-	0,00%
067.09	BPSDM	501.958.424,00	501.958.424,00	-	0,00%
067.10	Setjen	810.713.124,00	810.713.124,00	-	0,00%
067.11	BPI	56.788.000,00	56.788.000,00	-	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>115.537.418.571,00</b>	<b>115.537.418.571,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Tidak ada Mutasi Aset Tetap Lainnya, hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan saldo Aset Tetap Lainnya dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi nilai Aset Tetap Renovasi per 30 Juni 2022 sebesar Rp113.927.377.783,00 dengan rincian per UKE-I sebagai berikut:

*Rincian Aset Tetap Renovasi per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Nama UKE I	Jumlah
067.03	Ditjen PDP	36.355.000,00
067.04	Ditjen PEID	466.516.450,00
067.06	Ditjen PPDT	1.878.310.000,00
067.07	Ditjen PPKTrans	111.216.212.288,00
067.09	BPSDM	329.984.045,00
	<b>Total</b>	<b>113.927.377.783,00</b>

- Aset tetap renovasi Ditjen PDP per 30 Juni 2022 sebesar Rp36.355.000,00 atas perubahan belanja pemeliharaan untuk dikapitalisasikan menjadi aset Ditjen PDP terkait pembuatan grill selokan area belakang gedung Ditjen PDP;
- Aset Tetap Renovasi Ditjen PEID per 30 Juni 2022 sebesar Rp466.516.450,00 merupakan renovasi gedung/bangunan

Tahun 2016 yang digunakan oleh Ditjen PKP. Aset tersebut merupakan milik Kementerian Dalam Negeri yang digunakan oleh Ditjen PKP sesuai dengan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/4812/SJ Tanggal 26 Agustus 2015 kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi perihal Penggunaan Gedung Kantor Eks. Ditjen Dukcapil Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, sedangkan alih status Bangunan/ Gedung tersebut dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi masih dalam proses;

- Aset Tetap Renovasi Ditjen PPDT per 30 Juni 2022 sebesar Rp1.878.310.000,00 merupakan pekerjaan renovasi gedung dan bangunan sebesar Rp1.596.000.000,00 yang berlokasi di Jalan Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat milik Kementerian Sekretariat Negara yang dipakai untuk pelaksanaan pemerintahan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi serta pekerjaan perencanaan dan pengawasannya sebesar Rp84.560.000,00 dan adanya penambahan Aset Tetap Renovasi pada Ditjen PPDT merupakan renovasi ruang tunggu tamu menjadi cafeteria. Pekerjaan renovasi tersebut sesuai dengan kontrak No. 019/SPK/SATKER-PPK.I/XI/2017 tanggal 1 November 2017 dengan nilai kontrak Rp197.750.000,00. Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap dalam Renovasi Gedung yang saat ini sedang diproses pelaporan atas renovasi gedung kepada Sekretariat Negara;
- Aset Tetap Renovasi pada Ditjen PPKTrans per 30 Juni 2022 sebagai berikut:

*Rincian Aset Tetap Renovasi per Satker  
Ditjen PPKTrans per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai
1	067.07.069393	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH	919.983.499,00
2	067.07.350120	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KAB. ACEH UTARA	599.200.000,00
3	067.07.350172	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	58.261.000,00
4	067.07.350183	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG	534.750.000,00
5	067.07.350189	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	108.713.000,00
6	067.07.350288	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU UTARA	19.000.000,00
7	067.07.350289	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. LUWU TIMUR	672.412.600,00
8	067.07.350304	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KONawe SELATAN	8.053.690.600,00
9	067.07.350396	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA TIMUR	158.300.000,00
10	067.07.350430	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN FAK-FAK	1.379.636.000,00
11	067.07.350467	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	95.460.008.288,00
12	067.07.417757	DINAS NAKERTRANS KAB. BULUNGAN	3.137.422.301,00
13	067.07.419109	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KAB. POI	114.835.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>111.216.212.288,00</b>

- Aset Tetap Renovasi BPSDM per 30 Juni 2022 sebesar Rp329.984.045,00 adalah renovasi gedung Balai Besar Pelatihan Masyarakat Desa, PPDT dan Transmigrasi Jakarta milik instansi Kementerian Ketenagakerjaan RI, sudah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan mengajukan permohonan penyerahan Aset Tetap dalam Renovasi kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui surat Nomor: 686/SJ-KDPPDPT/05/2017 Tanggal 17 Mei 2017, pada tanggal pelaporan masih dalam proses penyelesaian.

### **C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp  
18.807.755.884,00

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp18.807.755.884,00 dan Rp17.670.622.284,00. Terdapat kenaikan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2022 sebesar Rp1.137.133.600,00 atau 6,44 persen dibandingkan tahun 31 Desember 2021.

Perbandingan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Unit Kerja Eselon I di Lingkup KDPPDPT Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada berikut:

*Rincian Aset Tetap KDP pada Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.07	Ditjen PKP2TRans	18.754.305.884,00	17.617.172.284,00	1.137.133.600,00	6,45%
067.09	Balilatfo	53.450.000,00	53.450.000,00	-	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>18.807.755.884,00</b>	<b>17.670.622.284,00</b>	<b>1.137.133.600,00</b>	<b>6,44%</b>

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>17.670.622.284,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>1.087.561.100,00</b>
Perolehan/Penambahan KDP	1.087.561.100,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>18.758.183.384,00</b>

Terdapat KDP pada Laporan Keuangan Kemendesa PDTT dengan uraian sebagai berikut:

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Ditjen PKP2Trans sebagai berikut:

No	Uraian Satker	Saldo
1	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KAB. ACEH UTARA	599.096.100,00
2	DINAS NAKER TRANS KABUPATEN BANYUASIN	538.037.500,00
3	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. LUWU TIMUR	2.037.759.100,00
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU	702.612.351,00
5	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN	6.787.717.818,00
6	SIDRAP	8.089.083.015,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.754.305.884,00</b>

2. Aset KDP BPSDM per 31 Desember 2020 senesar Rp153.280.000,00 yang terbagi menjadi 2 pekerjaan yaitu *Caffe* Gedung Utama dan *Home Stay* terdapat pada Balai Latihan Masyarakat Denpasar. Adapun rincian aset KDP sebagai berikut:

- Aset KDP berupa *Home Stay* sebesar Rp53.450.000,00 sesuai dengan DIPA Nomor:DIP-067-09.2.350485/2020

tanggal 5 Desember 2019 dimana terdapat Belanja Modal Pembangunan Gedung dan Bangunan senilai Rp3.797.782.000,00 namun pada tahun 2020 hanya terealisasi sebesar Rp53.450.000,00 berupa Perencanaan Pembuatan Home Stay senilai Rp53.450.000,00 dengan Kontrak Nomor SPK Nomor:22.2/K05/KU.02.02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Dafrosa alamat jalan Gandapura No.15 Denpasar dengan jangka waktu pengerjaan selama 45 hari dari tanggal 02 Maret s.d. 15 April 2020. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, anggaran belanja modal gedung dan bangunan direalokasi untuk menangani pandemi sehingga pembangunan di BPPMDDTT Denpasar tahun 2020 tertunda;

- Aset KDP *Caffe* Gedung Utama sebesar Rp99.830.000,00 sesuai dengan DIPA Nomor:DIP-067-09.2.350485/2020 tanggal 5 Desember 2019 dimana terdapat Belanja Modal Pembangunan Gedung dan Bangunan senilai Rp3.797.782.000,00 dengan Kontrak Nomor SPK Nomor:22.2/K06/KU.02.02/III/2020 yang dilaksanakan oleh CV. Permata Konsultan Jalan WR. Supratman Gang II No. 9 Denpasar dengan jangka waktu pengerjaan selama 45 hari dari tanggal 02 Maret s.d. 15 April 2020. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, anggaran belanja modal gedung dan bangunan direalokasi untuk menangani pandemi sehingga pembangunan di BPPMDDTT Denpasar tahun 2020 tertunda. Pada tahun 2021 pengerjaan *Caffe* Gedung Utama telah dilanjutkan dan selesai.

Sehingga saldo KDP BPSDM per 30 Juni 2022 sebesar Rp53.450.000,00 berupa *Home Stay* yang sampai saat ini belum dilanjutkan.

### C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(Rp740.758.369.997,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing (Rp740.758.369.997,00) dan ((Rp725.372.452.628,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2022

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	404.577.279.582,00	342.878.134.802,00	61.699.144.780,00
2	Gedung dan Bangunan	603.103.929.447,00	70.647.149.316,00	532.456.780.131,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	858.538.687.671,00	318.494.316.137,00	540.044.371.534,00
4	Aset Tetap Lainnya	115.537.418.571,00	8.738.769.742,00	106.798.648.829,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.981.757.315.271,00</b>	<b>740.758.369.997,00</b>	<b>1.240.998.945.274,00</b>

### C.19 Aset Tetap Yang Belum Diregister

Aset Tetap Yang Belum Diregister  
Rp4.494.339.857,00

Nilai Aset Tetap Yang Belum Diregister per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing - masing sebesar Rp4.494.339.857,00 dan Rp0,00. Adanya nilai Aset Tetap yang belum diregister per 30 Juni 2022 dikarenakan belanja barang persediaan belum di input pada aplikasi dan akan diproses input pada Semester II.

Adapun rincian Aset Tetap belum diregister pada masing-masing satker per 30 Juni 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tetap Belum Diregister  
Pada Unit Eselon I  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022
067.07	Ditjen PPKTrans	4.315.399.857,00
067.10	Setjen	178.940.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.494.339.857,00</b>

**C.20 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

*Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp183.600.174,00*

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp183.600.174,00 dan Rp30.714.287,00. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR sebagai berikut:

*Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Eselon I  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.07	Ditjen PKP2TRans	183.600.174,00	30.714.287,00	152.885.887,00	83,27%
<b>JUMLAH</b>		<b>183.600.174,00</b>	<b>30.714.287,00</b>	<b>152.885.887,00</b>	<b>497,77%</b>

Piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/TGR merupakan Pencatatan atas Saldo Awal Piutang Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dalam modul piutang di Aplikasi Sakti atas Piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/TGR merupakan Pencatatan atas hilangnya kendaraan dinas roda 4 sesuai dengan atensi temuan hasil audit surat itjen No.Rhs.232/PW.03.01/VII/2019 Ditjen PKP2Trans Tanggal 30 Juli 2019, dimana piutang tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR sesuai dengan time line penyelesaian pengembalian kerugian negara di tahun 2022 sebesar Rp30.714.287,00 dan Bagian lancar Tagihan TGR sebesar

Rp57.800.000,-merupakan piutang jangka panjang yang harus dibayarkan atau dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu bulan Juli tahun 2022 (sudah dilakukan penyeteroran sebesar Rp2.000.000,00 pada tanggal 11 Januari 2022 dan sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 25 April 2022 bukti setor terlampir dan sudah di bukukan modul piutang Aplikasi Sakti 2022) dan pencatatan Piutang TGR di Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Ditjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi 067.08.350463 yang merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 15/HP/XVI/01/2011 dan telah dilakukan jurnal transfer keluar dari 067.08.350463 dan jurnal transfer masuk ke 067.07.350467 di tahun 2021 sebesar Rp87.967.100,00. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 31 Desember 2021 sebesar Rp87.967.100,00 tetapi ada pencatatanya di modul piutang di bulan Juli.

### C.21 Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Rp2.300.143,44)

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah (Rp2.300.143,44) dan (Rp1.535.714,00).

#### Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang TP/TGR Per 30 Juni 2022

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
Penyisihan PPKTrans	183.600.174,00		2.300.143,44
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>183.600.174,00</b>		<b>2.300.143,44</b>

### C.22 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (NETTO)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (NETTO)  
Rp181.300.030,56

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp181.300.030,56 dan Rp0,00.

Rincian Tuntutan Tagihan TP/TGR (Netto)  
Per 30 Juni 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Bersih
1	Lancar	183.600.174,00	2.300.143,44	185.900.317,44
2	Kurang Lancar	-	-	-
3	Diragukan	-	-	-
4	Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>183.600.174,00</b>	<b>2.300.143,44</b>	<b>185.900.317,44</b>

### C.23 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud  
Rp9.312.624.004,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp9.312.634.004,00 dan Rp9.304.684.004,00. Aset Tak Berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp7.950.000,00 atau 0,09 persen dibandingkan tahun 31 Desember 2021.

Rincian Aset Tak Berwujud yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.03	Ditjen PDP	658.899.100,00	658.899.100,00	-	0,00%
067.06	Ditjen PDT	852.370.000,00	852.370.000,00	-	0,00%
067.07	Ditjen PKP2Trans	1.808.464.000,00	1.808.464.000,00	-	0,00%
067.09	BPSDM	117.500.000,00	117.500.000,00	-	0,00%
067.10	Setjen	1.874.630.000,00	1.866.680.000,00	7.950.000,00	0,43%
067.11	BPI	4.000.770.904,00	4.000.770.904,00	-	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>9.312.634.004,00</b>	<b>9.304.684.004,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>0,09%</b>

Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud  
Berdasarkan Jenisnya Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	8.692.894.004,00
2	ATB Lainnya	619.740.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.312.634.004,00</b>

Daftar Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2022 sebesar Rp9.312.634.004,00 menurut jenisnya pada Masing-Masing Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

No	UKE-I	ATB Software	ATB Lainnya	Jumlah
1	Ditjen PDP	658.899.100,00	-	658.899.100,00
2	Ditjen PDT	852.370.000,00	-	852.370.000,00
3	Ditjen PKP2Trans	1.196.674.000,00	611.790.000,00	1.808.464.000,00
4	BPSDM	117.500.000,00		117.500.000,00
5	Setjen	1.866.680.000,00	7.950.000,00	1.874.630.000,00
6	BPI	4.000.770.904,00		4.000.770.904,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.692.894.004,00</b>	<b>619.740.000,00</b>	<b>9.312.634.004,00</b>

Mutasi Aset Tak Berwujud Per 30 Juni 2022 sebagai berikut:

*Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>9.304.684.004,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>7.950.000,00</b>
Pembelian	7.950.000,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>9.312.634.004,00</b>
Amortisasi	7.854.386.817,00
<b>Nilai Buku Akhir</b>	<b>1.458.247.187,00</b>

Mutasi Tambah yang berasal dari Pembelian sebesar Rp7.950.000,00 terdapat pada Setjen

### **C.24 Aset Lain-Lain**

Aset Lain-Lain  
Rp1.428.971.979.371,00

Aset Lain-lain per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp1.428.971.979.371,00 dan Rp1.428.971.979.371,00. Aset Lain-lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi serta dalam proses penghapusan dari BMN. Tidak terdapat penurunan atau kenaikan nilai Aset Lain- Lain dibandingkan 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian nilai Aset Lain- Lain yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada berikut.

*Rincian Aset Lain- Lain per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.01	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	9,00	9,00	-	0,00%
067.02	Inspektorat Jenderal	81.485.600,00	81.485.600,00	-	0,00%
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	271.412.030,00	271.412.030,00	-	0,00%
067.04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa	29.780.259.403,00	29.780.259.403,00	-	0,00%
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	472.033.745.621,00	472.033.745.621,00	-	0,00%
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan	914.754.970.440,00	914.754.970.440,00	-	0,00%
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	(18.110.620.627,00)	(18.110.620.627,00)	-	0,00%
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan	2.014.282.378,00	2.014.282.378,00	-	0,00%
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	28.012.206.517,00	28.012.206.517,00	-	0,00%
067.11	Badan Penelitian dan Informasi	134.238.000,00	134.238.000,00	-	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>1.428.971.979.371,00</b>	<b>1.428.971.979.371,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Terdapat Aset Tetap yang Tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintahan pada satker null (067.01.190132) Akun 166111 sebesar Rp9,00.

Tidak ada Mutasi Aset Lain – lain per 30 Juni 2022, hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan saldo Aset Lain – lain dari 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.

### **C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
(Rp841.811.603.411,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp841.811.603.411,00) dan (Rp827.967.412.591,00). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	ATB Software Komputer	8.692.894.004,00	7.854.386.817,00	838.507.187,00
2	ATB Lainnya	619.740.000,00		619.740.000,00
	Jumlah	9.312.634.004,00	7.854.386.817,00	1.458.247.187,00
3	Aset Lain-lain	1.428.971.979.371,00	834.288.508.895,00	594.683.470.476,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.438.284.613.375,00</b>	<b>842.142.895.712,00</b>	<b>596.141.717.663,00</b>

### C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp42.766.289.494,00*

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp42.766.289.494,00 dan Rp4.356.743.309,00. Utang kepada Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp38.409.546.185,00 atau 881,61% dari tahun 31 Desember 2021.

Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga  
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Inspektorat Jenderal	2.009.225.609,00	-	2.009.225.609,00	100,00%
067.03	Ditjen PDP	2.670.814.220,00	180.400,00	2.670.633.820,00	1480395,69%
067.04	Ditjen PEID	8.469.172.752,00	2.394.399.107,00	6.074.773.645,00	253,71%
067.06	Ditjen PDT	3.875.989.394,00	1.144.263.304,00	2.731.726.090,00	238,73%
067.07	Ditjen PPKTrans	7.085.622.665,00	-	7.085.622.665,00	100,00%
067.09	BPSDM	7.760.644.255,00	93.152.423,00	7.667.491.832,00	8231,12%
067.10	Setjen	8.112.587.808,00	724.748.075,00	7.387.839.733,00	1019,37%
067.11	BPI	2.696.541.385,00	-	2.696.541.385,00	100,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>42.680.598.088,00</b>	<b>4.356.743.309,00</b>	<b>38.323.854.779,00</b>	<b>879,64%</b>

**C.27 Utang yang Belum Ditagihkan**

Utang Yang Belum  
Ditagihkan  
Rp14.532.717.272,00

Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp14.532.717.272,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian persediaan belum diregister pada masing-masing Eselon I per 30 Juni 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

*Rincian Utang yang Belum Ditagihkan  
Pada Unit Eselon I  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022
067.02	Inspektorat Jenderal	133.787.305,00
067.03	Ditjen PDP	2.077.105.988,00
067.04	Ditjen PEID	1.058.360.056,00
067.06	Ditjen PDT	228.412.634,00
067.07	Ditjen PPKTrans	2.421.244.752,00
067.09	BPSDM	3.458.637.222,00
067.10	Setjen	3.588.037.415,00
067.11	BPI	1.567.131.900,00
<b>JUMLAH</b>		<b>14.532.717.272,00</b>

**C.28 Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima  
Dimuka  
Rp759.320.242,00

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp759.320.242,00 dan Rp759.320.242,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/ jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 sebesar Rp759.320.242,00 sebagai berikut:

Nama Rekanan	PDD 2020	Akrual 2021	Setoran 2021	Akrual 2021	PDD 2021
CV Latere	20.664.088,89	20.664.088,89	15.046.667,00	15.046.667,00	-
PT Dayamitra Telekomunikasi	11.083.333,33	11.083.333,33	299.932.000,00	68.040.129,63	231.891.870,37
Usaha Café Gita Sabela	7.948.416,67	7.948.416,67	2.827.500,00	2.827.500,00	-
Warung Kopi Manaek Sinaga	2.666.666,67	2.666.666,67	-	-	-
PT BRI	64.011.500,00	64.011.500,00	-	-	-
PT BNI	386.469.525,49	149.120.074,14	-	-	237.349.451,34
ATM BRI	24.464,68	24.464,68	-	-	-
Usaha Foto Copy Nur Kholiq	21.184.122,22	13.474.000,00	-	-	7.710.122,22
PT Antara Persada Sukses	28.865.520,83	19.793.500,00	-	-	9.072.020,83
PT Telekomunikasi Seluler	44.527.777,78	35.000.000,00	-	-	9.527.777,78
CV Amora	-	-	36.000.000,00	36.000.000,00	-
Gedung Makarti	230.000.000,00	85.000.000,00	118.769.000,00	-	263.769.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>817.445.415,55</b>	<b>408.786.044,38</b>	<b>472.575.167,00</b>	<b>121.914.296,63</b>	<b>759.320.241,55</b>

Pendapatan Diterima Dimuka Gedung Makarti yang awalnya sebesar Rp 230.000.000,00 berkurang sebesar Rp 85.000.000,00 merupakan pengajuan pengembalian biaya sewa Gedung Makarti yang tidak terlaksana kegiatannya pada tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19 oleh penyewa dan sudah dikembalikan ke rekening berdasarkan SKTB yang telah diajukan ke KPPN Jakarta VI melalui Surat Pengajuan Nomor S-324-S-329/KU.08.05/XI/2021 tanggal 24 November 2021.

### C.29 Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka KPPN  
Rp25.182.175.503,00

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp25.182.175.503,00 dan Rp10.716.000,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

### C.30 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya  
Rp45.028.634,00

Utang jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing sebesar

Rp45.028.634,00 dan Rp1.327.350,00.

### **C.31 Ekuitas**

*Ekuitas*  
Rp2.726.997.238.337,56

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.726.997.238.337,56 dan Rp2.763.006.771.618,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL****D.1 Pendapatan-LO**

*Pendapatan*  
Rp668.664.445,00

Jumlah Pendapatan-LO pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp668.664.445,00 dan Rp1.140.776.005,00.

Rincian Pendapatan-LO pada periode 30 Juni 2022 per jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan-LO per jenis pendapatan  
Per 30 Juni 2022*

*(Dalam Rupiah)*

<b>Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Nilai</b>
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	255.572.920,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	361.461.982,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	5.734.613,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	45.894.930,00
<b>Jumlah Nilai Perolehan per 30 Juni 2022</b>		<b>668.664.445,00</b>

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp255.572.920,00 berasal dari BPSDM di satuan kerja Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu (350480).

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp361.461.982,00 merupakan pendapatan dari sewa Gedung Makarti, lahan parkir, pujasera, kantin dan fotocopy yang terdapat pada satuan kerja Sekretariat Jenderal (350088).

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp5.734.613,00 berasal dari satuan kerja Ditjen PEID (350453) sebesar Rp4.776.060,00 dan dari Dinas Keluarga Sejahtera, Mobduk dan Transmigrasi Kabupaten Simeuleu (350450) sebesar Rp958.553,00.

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp45.894.920,00 terdapat pada satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser (350245) senilai

Rp45.894.920,00 dan dari Balai Latihan Masyarakat Jayapura (255164) senilai Rp10,00.

Adapun Rincian Pendapatan-LO pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan-LO per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.03	Ditjen PDP	-	1.030,00
067.04	Ditjen PEID	4.776.060,00	-
067.05	Ditjen PDTu	-	381,00
067.07	Ditjen PPKTrans	46.853.473,00	198.106.019,00
067.09	BPSDM	255.572.930,00	243.301.790,00
067.10	Setjen	361.461.982,00	697.869.360,00
067.11	BPI	-	1.497.425,00
<b>JUMLAH</b>		<b>668.664.445,00</b>	<b>1.140.776.005,00</b>

## D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
Rp150.505.958.104,00*

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp150.505.958.104,00 dan Rp134.581.386.382,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 per jenis Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian jenis Beban Pegawai  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
511111	Beban Gaji Pokok PNS	63.743.881.872,00	56.276.134.080,00
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(35.757.700,00)	(11.283.800,00)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.050.090,00	939.100,00
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(192.270,00)	(5.733,00)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3.808.975.945,00	3.486.780.058,00
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(1.000.000,00)	-
511122	Beban Tunj. Anak PNS	914.992.547,00	822.566.448,00
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	5.268.170.000,00	5.365.053.050,00
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(43.795.000,00)	-
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4.575.633.200,00	2.478.224.000,00
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(3.240.495,00)	(2.250.150,00)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	471.102.438,00	468.804.203,00
511126	Beban Tunj. Beras PNS	3.106.311.060,00	2.754.494.700,00
511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS		59.025.000,00
511129	Beban Uang Makan PNS	7.100.198.000,00	7.456.902.000,00
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	82.190.000,00	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1.373.010.000,00	1.394.075.000,00
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(8.880.995,00)	(25.746.758,00)
511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	223.696.000,00	262.254.200,00
512211	Beban Uang Lembur	376.372.000,00	222.907.000,00
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	59.640.625.396,00	53.590.461.768,00
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	(87.383.984,00)	(17.947.784,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>150.505.958.104,00</b>	<b>134.581.386.382,00</b>

Rincian Beban Pegawai pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Pegawai per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	11.560.852.468,00	9.832.260.624,00
067.03	Ditjen PDP	15.970.281.377,00	13.465.904.187,00
067.04	Ditjen PEID	14.551.017.128,00	12.365.725.249,00
067.05	Ditjen PDTu		3.385.611.245,00
067.06	Ditjen PPDT	12.947.162.383,00	10.975.704.609,00
067.07	Ditjen PPKTrans	19.836.142.234,00	16.608.731.256,00
067.08	Ditjen PKTrans		4.561.611.511,00
067.09	BPSDM	34.406.517.900,00	31.379.870.526,00
067.10	Sekretariat Jenderal	27.335.316.798,00	22.846.441.617,00
067.10	BPI	13.898.667.816,00	9.159.525.558,00
<b>JUMLAH</b>		<b>150.505.958.104,00</b>	<b>134.581.386.382,00</b>

### D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan  
Rp4.757.069.303,00*

Beban Persediaan pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.757.069.303,00 dan Rp6.508.921.909,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan menurut Akun pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Perbandingan Beban Persediaan menurut Akun  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
593111	Beban Persediaan konsumsi	4.681.727.663,00	6.365.712.609,00
593131	Beban Persediaan bahan baku	1.267.200,00	4.919.000,00
593149	Beban Persediaan lainnya	74.074.440,00	138.290.300,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.757.069.303,00</b>	<b>6.508.921.909,00</b>

Rincian Beban Persediaan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Persediaan per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	732.126.900,00	707.614.100,00
067.03	Ditjen PDP	746.904.232,00	1.178.633.285,00
067.04	Ditjen PEID	8.133.000,00	1.073.782.850,00
067.05	Ditjen PDTu	-	
067.06	Ditjen PPDT	28.770.500,00	615.314.000,00
067.07	Ditjen PPKTrans	177.003.300,00	380.714.950,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	199.946.250,00
067.09	BPSDM	1.646.783.888,00	1.689.845.706,00
067.10	Sekretariat Jenderal	1.381.604.833,00	343.094.538,00
067.11	BPI	35.742.650,00	319.976.230,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.757.069.303,00</b>	<b>6.508.921.909,00</b>

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

*Beban Barang dan Jasa  
Rp805.267.132.904,00*

Beban Barang dan Jasa pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp805.267.132.904,00 dan Rp721.461.774.968,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa menurut akun pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Akun  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
521111	Beban Keperluan Perkantoran	43.671.453.628,00	32.889.379.446,00
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-	(4.061.000,00)
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.737.680,00	6.965.400,00
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	106.694.570,00	99.268.300,00
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	4.277.838.000,00	4.171.942.000,00
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(1.527.000,00)	-
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2.492.502.768,00	1.723.989.526,00
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.402.727.535,00	1.014.796.578,00
521211	Beban Bahan	15.031.376.510,00	9.598.115.315,00
521213	Beban Honor Output Kegiatan	4.812.354.000,00	2.965.449.000,00
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(5.400.000,00)	-
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.700.267.975,00	4.809.573.175,00
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	78.739.000,00	683.949.855,00
522111	Beban Langganan Listrik	4.317.877.220,00	4.045.644.300,00
522112	Beban Langganan Telepon	174.079.599,00	308.709.754,00
522113	Beban Langganan Air	221.236.499,00	161.878.953,00
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.845.223.643,00	305.717.742,00
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	849.350,00	-
522131	Beban Jasa Konsultan	13.166.132.948,00	1.588.197.956,00
522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	(588.223.920,00)	-
522141	Beban Sewa	32.141.630.323,00	20.080.117.642,00
522151	Beban Jasa Profesi	1.960.419.000,00	1.831.794.220,00
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	(2.895.000,00)	(2.775.000,00)
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(21.961.462,00)	(22.914.661,00)
522191	Beban Jasa Lainnya	671.226.964.539,00	633.820.206.008,00
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.227.071.499,00	1.385.830.459,00
522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	(15.000,00)	
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	24.979.000,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>805.267.132.904,00</b>	<b>721.461.774.968,00</b>

Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Unit Kerja Eselon I pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	3.591.129.202,00	3.030.415.456,00
067.03	Ditjen PDP	13.003.996.657,00	28.827.766.852,00
067.04	Ditjen PEID	44.965.292.290,00	7.201.354.661,00
067.05	Ditjen PDTu		312.300.000,00
067.06	Ditjen PPDT	8.536.650.123,00	5.367.900.314,00
067.07	Ditjen PPKTrans	22.099.463.457,00	16.422.357.394,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	856.608.799,00
067.09	BPSDM	646.665.930.243,00	627.929.023.341,00
067.10	Sekretariat Jenderal	47.123.479.640,00	27.843.732.439,00
067.11	BPI	19.281.191.292,00	3.670.315.712,00
<b>JUMLAH</b>		<b>805.267.132.904,00</b>	<b>721.461.774.968,00</b>

*Beban Pemeliharaan  
Rp18.083.353.889,00*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp18.083.353.889,00 dan Rp11.257.196.994,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 menurut jenis akun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Rincian Beban Pemeliharaan Menurut Akun  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.825.901.210,00	6.179.050.955,00
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	81.924.547,00	
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.907.322.643,00	4.874.467.889,00
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.180.554,00	39.864.500,00
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	154.341.036,00	100.193.550,00
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	75.255.899,00	49.327.500,00
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.428.000,00	14.292.600,00
<b>JUMLAH</b>		<b>18.083.353.889,00</b>	<b>11.257.196.994,00</b>

Adapun perbandingan Beban Pemeliharaan menurut Unit Kerja Eselon I per 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Beban Pemeliharaan Menurut Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	303.013.939,00	88.996.874,00
067.03	Ditjen PDP	603.045.020,00	748.360.513,00
067.04	Ditjen PEID	882.510.102,00	1.136.308.331,00
067.05	Ditjen PDTu		
067.06	Ditjen PPDT	498.929.380,00	223.092.071,00
067.07	Ditjen PPKTrans	992.907.073,00	619.624.318,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	8.309.500,00
067.09	BPSDM	2.556.438.092,00	2.070.530.013,00
067.10	Sekretariat Jenderal	11.767.344.269,00	6.285.773.283,00
067.11	BPI	479.166.014,00	76.202.091,00
<b>JUMLAH</b>		<b>18.083.353.889,00</b>	<b>11.257.196.994,00</b>

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp63.190.848.939,00*

Beban Perjalanan Dinas pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp63.190.848.939,00 dan Rp44.300.177.471,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Menurut Akun pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 menurut jenis akun dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas menurut Akun  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
524111	Beban Perjalanan Biasa	47.875.641.499,00	36.784.888.924,00
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(87.381.431,00)	-
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	104.423.301,00	139.582.000,00
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.686.728.640,00	1.653.072.757,00
524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	65.430.857,00
524115	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.112.196.722,00	5.657.202.933,00
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(150.000,00)	-
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	527.830.808,00	-
524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(28.440.600,00)	-
<b>JUMLAH</b>		<b>63.190.848.939,00</b>	<b>44.300.177.471,00</b>

Secara keseluruhan Beban Perjalanan Dinas mengalami peningkatan dikarenakan sudah mulai berjalannya kegiatan rapat secara offline baik meeting dalam kota maupun meeting luar kota. Selain itu sudah diberlakukannya perjalanan dinas luar kota meningkatkan beban perjalanan biasa. Beban perjalanan dinas Luar Negeri mengalami penurunan karena masih dibatasinya perjalanan Luar Negeri di tengah Pandemi COVID-19.

Adapun perbandingan Beban Perjalanan Dinas pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Beban Perjalanan Dinas menurut Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	3.432.076.538,00	2.725.319.117,00
067.03	Ditjen PDP	5.921.667.376,00	11.588.261.007,00
067.04	Ditjen PEID	7.584.925.363,00	2.470.908.296,00
067.05	Ditjen PDTu	-	-
067.06	Ditjen PPDT	3.927.515.413,00	3.083.234.977,00
067.07	Ditjen PPKTrans	11.753.971.942,00	5.008.852.238,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	198.957.848,00
067.09	BPSDM	17.676.459.688,00	14.039.953.540,00
067.10	Sekretaris Jenderal	8.443.370.539,00	4.005.513.910,00
067.11	BPI	4.450.862.080,00	1.179.176.538,00
<b>JUMLAH</b>		<b>63.190.848.939,00</b>	<b>44.300.177.471,00</b>

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

*Beban Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat  
Rp2.460.221.314,00*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.460.221.314,00 dan Rp22.304.446.573,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah menurut akun pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada  
Masyarakat/Pemda menurut Akun  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
526121	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	54.000.000,00	
526122	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	300.000.000,00	
526123	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	-	3.704.843.286,00
526124	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	-	47.840.000,00
526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	1.025.000.000,00	15.825.000.000,00
526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	
593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	9.531.500,00	
593122	Beban Persediaan Tanah Bangunan Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat	199.283.000,00	
593123	Beban Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat	-	
593124	Beban Persediaan Peralatan dan Mesin Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	847.833.000,00	1.802.997.039,00
593125	Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	737.533.500,00
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	
593127	Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	140.413.148,00
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	24.573.814,00	45.819.600,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.460.221.314,00</b>	<b>22.304.446.573,00</b>

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat menurut Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat Menurut Unit Kerja Eselon I Per 30 Juni 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.03	Ditjen PDP	-	5.357.233.021,00
067.04	Ditjen PEID	300.000.000,00	15.825.000.000,00
067.06	Ditjen PPDT	1.025.000.000,00	-
067.07	Ditjen PPKTrans	1.125.689.814,00	1.122.213.552,00
067.09	BPSDM	720.000,00	-
067.09	Sekretariat Jenderal	8.811.500,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2.460.221.314,00</b>	<b>22.304.446.573,00</b>

**D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp29.651.276.633,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp29.651.276.633,00 dan Rp78.945.897.806,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut akun pada periode 30 Juni 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.305.332.437,00	17.381.774.602,00
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.099.318.415,00	7.247.024.140,00
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.240.513.416,00	23.967.861.280,00
591312	Beban Penyusutan Irigasi	638.483.024,00	4.525.658.540,00
591313	Beban Penyusutan Jaringan	192.147.220,00	981.440.856,00
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
592115	Beban Amortisasi Software	979.191.795,00	331.911.795,00
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	13.196.290.326,00	24.510.226.593,00
<b>JUMLAH</b>		<b>29.651.276.633,00</b>	<b>78.945.897.806,00</b>

Sedangkan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut Unit Kerja Eselon I pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut UKE-I  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Inspektorat Jenderal	723.033.024,00	596.157.039,00
Ditjen PDP	1.322.259.891,00	1.447.511.770,00
Ditjen PEID	2.280.131.931,00	2.201.143.698,00
Ditjen PDTu	-	-
Ditjen PPDT	13.201.585.386,00	14.066.151.913,00
Ditjen PPKTrans	4.187.075.918,00	44.499.458.875,00
Ditjen PKTrans	-	113.734.255,00
BPSDM	4.415.118.957,00	4.917.390.911,00
Sekretariat Jenderal	-	8.926.812.696,00
BPI	3.522.071.526,00	2.177.536.649,00
<b>JUMLAH</b>	<b>29.651.276.633,00</b>	<b>78.945.897.806,00</b>

**D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp100.000,00

Beban Penyisihan Tak Tertagih pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing masing sebesar Rp100.000,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut akun pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut Akun*

*Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	100.000,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-</b>

Sedangkan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut Unit Kerja Eselon I di lingkup KDPDTT per 30 Juni 2022 dan 2021 dapat dilihat pada table berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Unit Kerja Eselon I*

*Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.09	BPSDM	100.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-</b>

**D.10 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Defisit Kegiatan Non  
Operasional  
Rp6.763.663.060,00

*Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>265.310.578,00</b>	<b>(2.813.412.517,00)</b>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	265.310.578,00	98.055.887,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	2.911.468.404,00
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>6.498.352.482,00</b>	<b>1.993.314.432,00</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.499.852.482,00	1.993.314.432,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.500.000,00	-
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>6.763.663.060,00</b>	<b>(820.098.085,00)</b>

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per Unit Kerja Eselon I pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar  
Per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.09	BPSDM	194.560.578,00	98.055.887,00
067.10	Sekretariat Jenderal	70.750.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>265.310.578,00</b>	<b>98.055.887,00</b>

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Unit Kerja Eselon I pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar  
Per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.03	Ditjen PDP	-	2.761.190.687,00
067.09	BPSDM	-	136.124.717,00
067.10	Sekretariat Jenderal	-	14.153.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>2.911.468.404,00</b>

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Unit Kerja Eselon I pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  
Per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	25.368.693,00	7.705.654,00
067.03	Ditjen PDP	439.117.334,00	629.832.312,00
067.04	Ditjen PEID	1.860.404.715,00	136.400.313,00
067.05	Ditjen PDTu		257.871.848,00
067.06	Ditjen PPDT	844.430.127,00	249.831.924,00
067.07	Ditjen PPKTrans	1.158.320.971,00	318.682.250,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	1.840.558,00
067.09	BPSDM	431.822.416,00	248.621.594,00
067.10	Sekretariat Jenderal	613.522.687,00	139.493.898,00
067.11	BPI	1.126.865.539,00	3.034.081,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.499.852.482,00</b>	<b>1.993.314.432,00</b>

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Unit Kerja Eselon I pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Defisit LO  
Rp1.066.483.433.581,00

*Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  
Per Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.07	Ditjen PPKTrans	1.500.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>

**D.11 SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL**

Nilai Defisit Laporan Operasional pada periode 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.066.483.433.581,00 dan Rp1.019.039.124,00.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal  
Rp2.763.006.771.618,00

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.763.006.771.618,00 dan Rp2.739.050.841.674,00.

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO  
Rp1.066.483.433.581,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah defisit sebesar Rp1.066.483.433.581,00 dan Rp1.019.039.124.183,00.

### E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar  
Rp0,00

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian  
Aset  
Rp0,00

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Namun demikian, pada tahun 2021 metode harga perolehan terakhir diubah menjadi metode *First In First Out* (FIFO) sehingga tidak menimbulkan penyesuaian nilai aset persediaan.

### E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi  
Persediaan  
Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi  
Reklasifikasi  
(Rp11.000.000,00)

Koreksi atas Reklasifikasi pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp11.000.000,00) dan

(Rp3.040.945.684,00). Koreksi ini berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar pada LPE. Koreksi atas Reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan keluar BMN dari Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN.

Rincian Koreksi atas Reklasifikasi pada masing-masing UKE-I di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi atas Reklasifikasi Menurut UKE-I  
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	(11.000.000,00)	(3.040.945.684,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>(11.000.000,00)</b>	<b>(3.040.945.684,00)</b>

Koreksi atas Reklasifikasi pada beberapa Unit Kerja Eselon I dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset lainnya (391151) pada Ditjen PPKTrans (067.07) sebesar (Rp11.000.000,00) yang terdapat pada satker Dinas Nakertrans Kabupaten Banyuasin (067.07.350170) terjadi akibat transaksi reklasifikasi persediaan dikarenakan kesalahan kode referensi barang.

### **E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Selisih Revaluasi Aset  
Tetap  
Rp0,00*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung, dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

### **E.3.6 Koreksi Aset Non Revaluasi**

*Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi  
Rp98.484.543,00*

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp98.484.543,00 dan Rp24.181.787.941,00. Koreksi ini

berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi menurut Akun per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Menurut Akun  
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	98.484.543,00	30.956.930.573,00
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0,00	(6.775.142.632,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>98.484.543,00</b>	<b>24.181.787.941,00</b>

Sedangkan Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi menurut Unit Kerja Eselon I per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi UKE-I  
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	0,00	125.641.378,00
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9.980.000,00	23.291.263.353,00
067.10	Sekretariat Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi	88.504.543,00	764.883.210,00
<b>JUMLAH</b>		<b>98.484.543,00</b>	<b>24.181.787.941,00</b>

Koreksi Nilai aset non revaluasi sebesar Rp98.484.543,00 terdapat pada:

- A. BPSDM sebesar Rp9.980.000,00 terjadi pada satker:
  - 1) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (09.350484) sebesar Rp9.980.000,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3).
- B. Setjen sebesar Rp88.504.543,00 terjadi pada satker:
  - 1) Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (10.350088) sebesar Rp88.504.543,00

dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3).

### E.3.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain  
Rp159.121.457,56

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp159.121.457,56 dan (Rp194.441.469,00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Adapun rincian Koreksi lain-lain menurut Akun per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Lain-Lain Menurut Akun  
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
391119	Koreksi Lainnya	159.121.457,56	(194.441.469,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>159.121.457,56</b>	<b>(194.441.469,00)</b>

Sedangkan Koreksi Lain-Lain menurut Unit Kerja Eselon I per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Lain-Lain Menurut Unit Kerja Eselon I  
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	0,00	(194.441.469,00)
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	159.121.457,56	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>159.121.457,56</b>	<b>(194.441.469,00)</b>

Koreksi lain-lain sebesar Rp159.121.457,56 terdapat pada satker Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (07.350467) dikarenakan koreksi penyisihan piutang yang menyesuaikan piutang terbaru.

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp1.030.227.294.300,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.030.227.294.300,00 dan

Rp978.743.566.597,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Adapun rincian Transaksi Antar Entitas menurut akun per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut Akun  
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.037.686.078.850,00	981.922.878.483,00
313121	Diterima dari Entitas Lain	(7.458.784.550,00)	(3.234.146.324,00)
313211	Transfer Keluar	(776.000,00)	(623.235.047.995,00)
313221	Transfer Masuk	776.000,00	623.289.882.433,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.030.227.294.300,00</b>	<b>978.743.566.597,00</b>

A. Ditagihkan ke Entitas Lain (313111) sebesar Rp1.037.686.078.850,00 terdapat pada satker:

1. Inspektorat Jenderal sebesar Rp18.534.057.733,00
2. Ditjen PDP sebesar Rp33.879.462.712,00
3. Ditjen PEID sebesar Rp61.708.212.182,00
4. Ditjen PPDT sebesar Rp26.789.904.818,00
5. Ditjen PPKTrans sebesar Rp80.161.038.779,00
6. BPSDM sebesar Rp693.319.526.747,00
7. Setjen sebesar Rp88.304.562.562,00
8. BPI sebesar Rp34.989.313.317,00

B. Diterima dari Entitas Lain (313121) sebesar (Rp7.458.784.550,00) terdapat pada satker:

1. Inspektorat Jenderal sebesar (Rp25.368.693,00)
2. Ditjen PDP sebesar (Rp439.117.334,00)
3. Ditjen PEID sebesar (Rp1.865.180.775,00)
4. Ditjen PPDT sebesar (Rp844.430.127,00)
5. Ditjen PPKTrans sebesar (Rp1.210.131.489,00)
6. BPSDM sebesar (Rp901.955.924,00)
7. Setjen sebesar (Rp1.045.734.669,00)
8. BPI sebesar (Rp1.126.865.539,00)

C. Transfer Masuk sebesar Rp776.000,00 dan Transfer Keluar (Rp776.000,00) terdapat pada satker Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, PDT, dan Transmigrasi (09.350475).

Adapun rincian Transaksi Antar Entitas menurut Unit Kerja Eselon I per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 sebagai berikut:

*Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut UKE-I  
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021  
(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
067.02	Inspektorat Jenderal	18.508.689.040,00	16.724.329.890,00
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	33.440.345.378,00	59.418.930.453,00
067.04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	59.843.031.407,00	40.153.682.574,00
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	0,00	(13.376.709.558,00)
067.06	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	25.945.474.691,00	37.515.181.379,00
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	78.950.907.290,00	567.852.944.150,00
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	0,00	(482.590.504.481,00)
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat Deas, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	692.417.570.823,00	654.044.066.489,00
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	87.258.827.893,00	61.605.786.122,00
067.11	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	33.862.447.778,00	37.395.859.579,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.030.227.294.300,00</b>	<b>978.743.566.597,00</b>

### E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir  
Rp2.726.997.238.337,56*

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.726.997.238.337,56 dan Rp2.719.701.684.876,00.

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1 Tindak Lanjut Temuan

Rekapitalusi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – RI Tahun 2005 – 2020 sebagai berikut:

NO	Unit Kerja	Rekomendasi Temuan		Tindak Lanjut Sesuai				Tindak Lanjut Belum Sesuai (Sisa)			
		Butir	Rp	Butir	%	Rp	%	Butir	%	Rp	%
<b>A EKS Trans</b>											
	2005-2015 Eks Trans	318	7.217.422.862,11	141	44,34%	4.919.023.035,55	68,15%	318	100,00%	2.298.399.827,00	31,85%
<b>B Eks PDT</b>											
	2005-2015 Eks Trans	294	16.804.825.298,75	228	77,55%	15.653.990.500,97	93,15%	294	100,00%	1.150.834.798,00	6,85%
<b>Total A+B</b>		<b>612</b>	<b>24.022.248.160,86</b>	<b>369</b>	<b>60,29%</b>	<b>20.573.013.536,52</b>	<b>85,64%</b>	<b>612</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.449.234.625,00</b>	<b>14,36%</b>
<b>C SOTK Lama</b>											
1	Sekretariat Jenderal	88	13.904.707.542,00	45	51,14%	7.759.074.740,00	55,80%	88	100,00%	6.145.632.802,00	44,20%
2	Inspektorat Jenderal	36	820.383.116,00	32	88,89%	786.708.284,00	95,90%	36	100,00%	33.674.832,00	4,10%
3	Baillatfo	56	4.402.571.741,00	44	78,57%	3.679.269.481,00	83,57%	56	100,00%	723.302.260,00	16,43%
4	Ditjen PPMD	147	4.659.741.652,00	52	35,37%	2.457.646.416,00	52,74%	147	100,00%	2.202.095.236,00	47,26%
5	Ditjen PKP	174	8.857.404.465,00	59	33,91%	6.433.172.381,00	72,63%	174	100,00%	2.424.232.084,00	27,37%
6	Ditjen PDT	153	22.603.162.239,00	54	35,29%	8.829.688.496,00	39,06%	153	100,00%	13.773.473.743,00	60,94%
7	Ditjen PDTU	112	13.341.887.357,00	56	50,00%	10.600.512.628,00	79,45%	112	100,00%	2.741.374.729,00	20,55%
8	Ditjen PKT	94	3.677.941.044,00	56	59,57%	3.204.861.641,00	87,14%	94	100,00%	473.079.403,00	12,86%
9	Ditjen PKP2T	113	17.454.346.781,00	49	43,36%	11.048.660.658,00	63,30%	113	100,00%	6.405.686.123,00	36,70%
<b>Total C</b>		<b>973</b>	<b>89.722.145.937,00</b>	<b>447</b>	<b>45,94%</b>	<b>54.799.594.725,00</b>	<b>61,08%</b>	<b>973</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.922.551.212,00</b>	<b>38,92%</b>
<b>D SOTK Baru</b>											
1	Sekretariat Jenderal	16	31.821.833,00	0	0,00%	-	0,00%	16	100,00%	31.821.833,00	100,00%
2	Inspektorat Jenderal	12	-	0	0,00%	-	0,00%	12	100,00%	-	0,00%
3	Ditjen PDP	13	5.572.000,00	0	0,00%	4.922.000,00	88,33%	13	100,00%	650.000,00	11,67%
4	Ditjen PEID	15	15.284.500,00	1	6,67%	12.236.500,00	80,06%	15	100,00%	3.048.000,00	19,94%
5	Ditjen PPDT	14	1.445.000,00	1	7,14%	1.445.000,00	100,00%	14	100,00%	-	0,00%
6	Ditjen PPKT	23	995.477.344,00	0	0,00%	172.105.848,00	17,29%	23	100,00%	823.371.496,00	82,71%
7	BPSDM PM	27	277.916.200,00	1	3,70%	26.690.000,00	9,60%	27	100,00%	251.226.200,00	90,40%
8	BPI	12	36.620.985,00	0	0,00%	15.240.985,00	41,62%	12	100,00%	21.380.000,00	58,38%
<b>Total D</b>		<b>132</b>	<b>1.364.137.862,00</b>	<b>3</b>	<b>2,27%</b>	<b>232.640.333,00</b>	<b>17,05%</b>	<b>132</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.131.497.529,00</b>	<b>82,95%</b>

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menindaklanjuti Eks Kemnakertrans dan Eks Kementerian PDT yang diperkirakan sampai dengan November 2022.

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

#### F.2.1 Automatic Adjustment Belanja K/L

Pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi TA 2022 mendapat kebijakan penganggaran “Automatic Adjustment” atau pemblokiran anggaran/pencadangan anggaran.

- Automatic Adjustment tahap I dengan dasar Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 hal Automatic Adjustment Belanja K/L TA 2022. Automatic Adjustment tahap I ini sebesar 5% dari DIPA yang bertujuan untuk pencadangan anggaran penanganan pandemic COVID-19. Blokir pada halaman IV DIPA TA 2022

tahap bersumber dari belanja : Tunjangan Kinerja ke-13 dan Tukin THR, Belanja Honor Output Kegiatan (SK Tim/SK Panitia), Perjalanan Dinas, Paket *Meeting*, Belanja Barang Operasional / Non Operasional Lainnya, dan Anggaran kegiatan non prioritas.

- *Automatic Adjustment* tahap II dengan dasar Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 hal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA 2022. *Automatic Adjustment* tahap II ini bertujuan untuk penambahan belanja subsidi. Blokir pada halaman IV DIPA TA 2022 tahap bersumber dari belanja : Sumber dana rupiah murni (RM), di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional, di luar belanja anggaran pendidikan, di luar belanja Bantuan Sosial, dapat mencakup belanja modal dan barang non operasional yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022.

Berikut tabel rincian *Automatic Adjustment* TA 2022 per UKE-1

UKE I	Pagu Total	Tahap I	Tahap II	Pagu Setelah AA
Itjen	51.693.093.000,00	6.667.084.000,00	6.960.184.000,00	38.065.825.000,00
Dijen PDP	220.603.671.000,00	26.616.180.000,00	28.986.286.000,00	165.001.205.000,00
Ditjen PEID	324.054.010.000,00	17.418.485.000,00	19.434.240.000,00	287.201.285.000,00
Ditjen PPDT	82.590.648.000,00	13.580.807.000,00	13.327.849.000,00	55.681.992.000,00
Ditjen PKPKTrans	313.508.214.000,00	30.296.639.000,00	33.378.547.000,00	249.833.028.000,00
BPSDM	1.804.740.505.000,00	16.929.388.000,00	71.588.934.000,00	1.716.222.183.000,00
Sekretariat Jenderal	220.202.031.000,00	14.128.943.000,00	14.750.083.000,00	191.323.005.000,00
BPI	99.248.182.000,00	12.073.477.000,00	8.004.254.000,00	79.170.451.000,00
Jumlah	3.116.640.354.000,00	137.711.003.000,00	196.430.377.000,00	2.782.498.974.000,00

### F.2.2 Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas

Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN I, PN II, PN III, PN V, PN VI.

1. PN I : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pagu anggaran PN I adalah Rp6.890.479.000,00;
2. PN II : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pagu anggaran PN II adalah Rp2.068.019.127.000,00;
3. PN III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pagu anggaran PN III adalah Rp108.900.484.000,00;
4. PN V : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pagu anggaran PN V adalah Rp20.000.000.000,00
5. PN VI : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pagu anggaran PN VI adalah Rp9.374.736.000,00.

Untuk capaian kegiatan Prioritas Nasional RKP 2022 pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per rincian output terlampir di lampiran.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dari masing-masing Prioritas Nasional per UKE-1 adalah sebagai berikut:

1. PN I : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pagu Anggaran PN I adalah Rp6.890.479.000,00 dan total realisasi sebesar Rp52.697.000,00. Berikut rincian Program Prioritas Nasional pada masing-masing UKE I:

No	UKE I	Pagu	Realisasi	%
1	Ditjen PEID	750.000.000,00	-	0,00%
2	Ditjen PPKTrans	6.140.479.000,00	52.697.000,00	0,86%
Jumlah		6.890.479.000,00	52.697.000,00	0,76%

2. PN II : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi

kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pagu Anggaran PN II adalah Rp2.068.019.127.000,00 dan total realisasi sebesar Rp695.336.589.915,00. Berikut rincian Program Prioritas Nasional pada masing-masing UKE I:

No	UKE I	Pagu	Realisasi	%
1	DITJEN PDP	121.750.000.000,00	5.391.012.418,00	4,43%
2	DITJEN PEID	219.658.762.000,00	32.173.748.981,00	14,65%
3	DITJEN PPDT	16.631.846.000,00	4.918.528.456,00	29,57%
4	DITJEN PPKTRANS	120.343.530.000,00	18.739.366.827,00	15,57%
5	BPSDM	1.574.634.989.000,00	629.273.693.945,00	39,96%
6	SETJEN	15.000.000.000,00	4.840.239.288,00	32,27%
Jumlah		2.068.019.127.000,00	695.336.589.915,00	33,62%

3. PN III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pagu Anggaran PN III adalah Rp108.900.484.000,00 dan total realisasi sebesar Rp6.695.394.100,00. Berikut rincian Program Prioritas Nasional pada masing-masing UKE I:

No	UKE I	Pagu	Realisasi	%
1	Ditjen PDP	5.000.000.000,00	-	0,00%
2	Ditjen PEID	33.775.000.000,00	780.766.140,00	2,31%
3	BPSDM	70.125.484.000,00	5.914.627.960,00	8,43%
Jumlah		108.900.484.000,00	6.695.394.100,00	6,15%

4. PN V : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pagu Anggaran PN V adalah Rp20.000.000.000,00 dan total realisasi sebesar Rp7.398.564.833,00. Berikut rincian Program Prioritas Nasional pada masing-masing UKE I:

No	UKE I	Pagu	Realisasi	%
1	BPI	20.000.000.000,00	7.398.564.833,00	36,99%
Jumlah		20.000.000.000,00	7.398.564.833,00	36,99%

5. PN VI : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan

ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pagu Anggaran PN V adalah Rp9.374.736.000,00 dan total realisasi sebesar Rp1.243.774.562,00. Berikut rincian Program Prioritas Nasional pada masing-masing UKE I:

No	UKE I	Pagu	Realisasi	%
1	DITJEN PDP	5.000.000.000,00	53.314.562,00	1,07%
2	DITJEN PPDT	4.374.736.000,00	1.190.460.000,00	27,21%
Jumlah		9.374.736.000,00	1.243.774.562,00	13,27%

### F.2.3 Penyelesaian Migrasi Roll Out SAKTI

Modul Persediaan:

proses migrasi data persediaan sepenuhnya sudah diproses sistem dengan tidak ada data anomali persediaan. Hasil migrasi modul persediaan tidak terdapat perbedaan data antara SAKTI dengan *e-rekon*. Seluruh satker sudah menutup periode per 31 Desember 2021. Namun masih terdapat 18 satker yang belum mengupload berita acara migrasi (BAM) modul persediaan.

Modul Aset Tetap :

Proses migrasi data aset tetap sepenuhnya sudah diproses sistem namun masih terdapat data bmn anomali dengan status K3. Terdapat 6 satker yang masih memiliki status K3 yaitu: 1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Aceh Tengah (350136), 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Maluku Utara (350391), 3) Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (350467), 4) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Polewali Mandar (419109), 5) BPPMDDTT Banjarmasin (350484), 6) Sekretariat Jenderal (350088). Data anomali BMN tersebut di normalisasi pada aplikasi SAKTI di tahun pembukuan 2022. Hasil migrasi modul aset tetap tidak terdapat perbedaan data antara SAKTI dengan *e-rekon*. Seluruh satker sudah melakukan finalisasi modul aset tetap per 31 Desember 2021. Namun masih terdapat 26 satker belum mengupload BAM modul aset tetap.

Modul GLP:

Proses migrasi modul GLP sepenuhnya sudah diproses sistem namun masih terdapat 4 satker yang masih selisih antara SAKTU dengan *e-rekon*. Terdapat 10 satker belum melakukan tutup periode per 31 Desember 2021, satker tersebut adalah satker inaktif bersaldo (SIB). SIB tersebut merupakan satker dibawah naungan ex Ditjen PKTrans yang sudah likuidasi. Terdapat 39 satker belum mengupload BAM modul GLP.

#### **F.2.4 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)**

##### **Pinjaman Luar Negeri**

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana pinjaman luar negeri sebesar Rp344.000.000.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program *Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery*/Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Ditjen PDP sebesar Rp40.000.000.000,00 dengan lender *World Bank* yang berfokus pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan sistem akuntabilitas social dalam pembangunan Desa. P3PD Subkomponen 2B akan membiayai penguatan kader Desa, atau relawan masyarakat dan membiayai dukungan teknis Pusat Pembelajaran Masyarakat melalui kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditingkat pusat hingga daerah. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui P3PD akan didukung lebih lanjut dan direplikasikan ke Desa lainnya dan akan terintegrasi secara digital dengan platform seperti Akademi Desa 4.0, Go Desa dan *Smart Village*. Capaian realisasi Semester I prpgram ini sebesar Rp.1.641.948.361 atau 4,10% dikarenakan beberapa hal yaitu, proses lelang kegiatan LSM Barat, Tengah dan Timur yang akan selesai di bulan Agustus Tahun 2022 dan proses lelang kegiatan Perluasan Uji Coba *Score Card* Akuntabilitas Sosial di Desa, Pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat di Desa dan

kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial 2B yang belum selesai sehingga mempengaruhi realisasi pada Subkomponen 2B;

2. Program *Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery*/Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPSDM yang memiliki pagu sebesar Rp69.000.000.000,00 yang terealisasi sampai dengan semester 1 TA 2022 adalah Rp5.353.924.931,00 atau 8 persen dimana kegiatan tersebut berada di:

Puslat SDM dengan program kegiatan antara lain:

- Pengembangan Desain Online Video Platform untuk Akademi Desa 4.0 dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.250.000.000,-
- Produksi Konten Video Pembelajaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.350.000.000,-
- Fasilitas Pemanfaatan Akademi Berkelanjutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.750.000.000,-
- Kampanye Informasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,-
- Dukungan Manajemen PIU Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.265.840.000,-
- Monitoring dan Evaluasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp734.160.000,-

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan program kegiatan antara lain:

- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola TPP dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.420.951.000,-
- Dukungan Manajemen P3PD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.103.928.000,-
- Dukungan Operasional Kantor P3PD dengan alokasi anggaran sebesar Rp880.550.000,-
- Workshop Review dan Penyusunan Modul Peningkatan

- Kapasitas TPP P3PD dengan alokasi anggaran sebesar Rp584.222.000,-
- Konsolidasi Master of Trainers (MOT) Peningkatan Kapasitas TPP P3PD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.365.558.000,-
  - TOT Peningkatan Kapasitas TPP P3PD Metode Daring dengan alokasi anggaran sebesar Rp563.603.000,-
  - TOT Peningkatan Kapasitas TPP P3PD Region I Metode Tatap Muka dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.982.355.000,-
  - TOT Peningkatan Kapasitas TPP P3PD Region II Metode Tatap Muka dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.420.766.000,-
  - TOT Peningkatan Kapasitas TPP P3PD Region III Metode Tatap Muka dengan Rp3.383.959.000,-
  - TOT Peningkatan Kapasitas TPP P3PD Region IV Metode Tatap Muka dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.100.894.000,-
  - Harmonisasi Regulasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,-
  - Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.690.281.000,-
  - Rapat Koordinasi P3PD Sub Komponen 2A TA 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.128.251.000,-
  - Monitoring dan Evaluasi P3PD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,-
  - Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp613.604.000,-
  - Pengembangan Metode LMS (Learning Management System) dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.181.820.000,-
  - Learning Management System (Design) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.400.000.000,-
3. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Sekretariat Jenderal dengan pagu anggaran

sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan realisasi semester 1 TA 2022 sebesar Rp5.803.110.758,00;

4. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPI dengan pagu anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan realisasi semester 1 TA 2022 sebesar Rp7.398.564.833,00 atau 36,99 persen. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Untuk Pengembangan Desa Digital melalui *Smart Village* dimana PIU (Project Implementing Unit) adalah Pusdaing (Pusat Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi);
5. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang sumber pendanaannya adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui IFAD pada Ditjen PEI-DDTT. Program TEKAD ini menysasar pada 5 (lima) provinsi yaitu Maluku Utara, Maluku, NTT, Papua dan Papua Barat. Tahun Anggaran 2021 dari Pinjaman Luar Negeri pada kegiatan TEKAD ini memiliki anggaran pagu belanja sebesar Rp200.000.000.000,00. 3. Pagu Pinjaman Luar Negeri pada Tahun 2022 sebesar Rp200.000.000.000,00 sudah terealisasi sebesar Rp31.572.100.416 atau sebesar 16,08%

### **Hibah Luar Negeri**

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana hibah luar negeri sebesar Rp18.420.308.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program Investing In Nutrition Early Years (INEY) di Ditjen PDP dengan tujuan memfasilitasi desa dalam mendukung pelaksanaan intervensi sensitif dan intervensi spesifikasi serta terjadinya konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa. Tahun 2022 Hibah Luar Negeri (INEY) sebesar Rp10.736.546.000,00. (Penjelasan lebih lanjut pada poin **F.2.5 Laporan Stunting TA 2022**);
2. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)

yang sumber pendanaannya adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui IFAD. Tahun Anggaran 2022 Hibah Luar Negeri pada kegiatan TEKAD ini memiliki anggaran pagu belanja sebesar Rp7.683.762.000,00. Pada semester 1 2022 belum ada realisasi atau sebesar 0 persen.

### **F.2.5 Laporan Stunting TA 2022**

Program percepatan penurunan stunting pada Kementerian Desa PDTT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp673.983.000 dan hibah luar negeri sebesar Rp10.736.546.000.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan tanggungjawab utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai pilar ke-5 untuk melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting dengan target 90% Pemerintah Desa memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting dilihat dari tingkat konvergensi dan alokasi APBDesa untuk penurunan stunting. (a.l. tingkat konvergensi dan ada alokasi APBDesa untuk stunting).

Data Alokasi Anggaran Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa pada semester 1 Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Kementerian Desa PDTT pada Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan meliputi Program/Kegiatan dengan rincian output QDD.001 Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi Stunting yang bersumber dari rupiah murni APBN dengan Pagu Awal DIPA semula sebesar Rp5.000.000.000 menjadi Rp.677.683.000 setelah adanya Automatic Adjustment Tahap 2 per 20 Juni 2022 dan Program/Kegiatan dengan rincian output BDC.003 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan stunting (INEY) bersumber dari hibah melalui Program INEY dengan Pagu DIPA sebesar Rp10.736.546.000 yang baru masuk on DIPA Ditjen Pembangunan Desa dan

Perdesaan per tanggal 18 Mei 2022. Adanya Automatic Adjustment Tahap 1 menyebabkan penyesuaian anggaran pada pada Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, termasuk anggaran percepatan Penurunan stunting di Desa menjadi sebesar Rp.993.173.000. Dengan adanya penyesuaian anggaran tersebut sangat berpengaruh sekali pada perubahan yang signifikan capaian target output Kinerja Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, sehingga penting dilakukan penyesuaian capaian target output Kinerja Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting. Pada tanggal 15 Februari 2022 telah disampaikan kepada BAPPENAS adanya penyesuaian target menjadi 98 kelompok masyarakat setelah Automatic Adjustment Tahap 1. Sedangkan pada tanggal 20 Juni 2022 adanya Automatic Adjustment Tahap 2 menyebabkan anggaran percepatan Penurunan stunting di Desa menjadi sebesar Rp.677.683.000. dan telah disampaikan kepada BAPPENAS adanya penyesuaian target menjadi 35 kelompok masyarakat.

Data Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 setelah Automatic Adjustment Tahap 2 per tanggal 20 Juni 2022 yang disampaikan oleh Kementerian Desa PDTT meliputi Program/Kegiatan Stunting yang ada di Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan pada rincian output QDD.001.051 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.677.683.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp100.097.998 atau sebesar 14.85% meliputi kegiatan Sosialisasi Panduan Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting di Desa dengan alokasi kegiatan sebesar Rp.459.263.000 dengan capaian realisasi 0%, Penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan kepada Desa (Perlinsos, Kemiskinan Extrem, Keluarga dan Kesehatan) dengan alokasi kegiatan sebesar Rp.3.700.00 dengan capaian realisasi sebesar 0%, Sosialisasi Fasilitasi Perlindungan Sosial di Desa dengan alokasi kegiatan sebesar Rp.9.900.000 dengan capaian realisasi sebesar 0% dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan alokasi

kegiatan sebesar Rp.204.820.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp.100.097.998 atau sebesar 48,87%.

Selain itu, berikut disampaikan Data Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 per tanggal 30 Juni 2022 untuk Program/Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting melalui program INEY yang bersumber dari hibah pada rincian output BDC.003 dengan jumlah anggaran dengan Pagu DIPA sebesar Rp10.736.546.000 dan realisasi anggaran sampai dengan bulan juni tahun 2021 masih sebesar Rp381.006.000 atau 3,55%. yaitu kegiatan pada MAK Dukungan Manajemen berupa Sewa kantor dukungan manajemen sebesar Rp145.000.000 Sewa Alat Elektronik sebesar Rp93.450.000 Sewa Furniture sebesar Rp122.780.000, Pembelian ATK dan bahan komputer sebesar Rp2.976.000. Pembayaran honorarium kegiatan Sosialisasi Panduan Fasilitasi konvergensi penurunan stunting di Desa Tahap I sebesar Rp. 8.500.000 dan tahap II sebesar Rp.8.300.000.

Adapun permasalahan yang mempengaruhi penyerapan realisasi anggaran percepatan Penurunan stunting di Desa adalah belum terbitnya No Objection Issued - Procurement Plan dari World Bank yang banyak berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan yang melalui pihak ketiga (lelang).

Kegiatan Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa bersumber dari ABPN terdiri dari :

A. Sosialisasi Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa dengan alokasi kegiatan sebesar Rp.459.263.000 dengan capaian realisasi masih 0%. Hal ini dikarenakan realisasi kegiatan Sosialisasi Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa pada Kabupaten Probolinggo belum masuk SP2D karena baru dilaksanakan pada 27 Juni 2022 (sudah dilaksanakan).

B. Penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan kepada Desa (Perlinsos, Kemiskinan Extrem, Keluarga dan Kesehatan)

Alokasi kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan kepada Desa (Perlinsos, Kemiskinan Extrem, Keluarga dan Kesehatan) sebesar Rp.3.700.000 dengan capaian realisasi sebesar 0% atau belum dilaksanakan.

C. Sosialisasi Fasilitasi Perlindungan Sosial di Desa

Alokasi kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Perlindungan Sosial di Desa dengan alokasi kegiatan sebesar Rp.9.900.000 dengan capaian realisasi sebesar 0% atau belum dilaksanakan.

D. Monitoring Evaluasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa (Belanja Perjalanan Dinas Biasa)

Pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) dengan alokasi kegiatan sebesar Rp.204.820.000 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.100.097.998 atau sebesar 48,87%.

Adapun permasalahan yang mempengaruhi penyerapan realisasi anggaran percepatan Penurunan stunting di Desa diantaranya:

a. Adanya Automatic Adjustement 2 tahap mengakibatkan adanya penyesuaian anggaran, sehingga banyak kegiatan Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting yang tidak bisa terlaksana di semester 1. Adanya pembekuan anggaran dikarenakan Automatic Adjustement, menyebabkan kegiatan Sosialisasi Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa yang semula diagendakan pada 3 regional menyebabkan adanya pengurangan lokasi kegiatan sehingga hanya di 2 regional yaitu Kab Probolinggo dan Kab Manggarai Barat. Hal ini mengakibatkan Sosialisasi Panduan Fasilitasi

Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa pada Kabupaten Probolinggo baru terlaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 dan pada Kabupaten Manggarai Barat direncanakan pada tanggal 26 Juli 2022. Hal tersebut sangat berpengaruh sekali pada perubahan yang signifikan capaian target output Kinerja Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, sehingga penting dilakukan penyesuaian capaian target output Kinerja Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting;

b. Program INEY baru masuk on DIPA ditjen PDP per tanggal 18 Mei 2022 artinya Program INEY baru dapat berjalan di Semester 2 Tahun 2022 hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya penyerapan realisasi anggaran tahun 2022.

Cara mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan memiliki solusi sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan pada tahun 2022 yang terdampak automatic adjusment akan direkomendasikan kembali untuk dimunculkan pada DIPA di tahun 2023 agar dapat dilaksanakan pada tahun 2023. Hal tersebut juga berpengaruh sekali pada perubahan yang signifikan capaian target output Kinerja Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, sehingga penting dilakukan penyesuaian capaian target output Kinerja Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting yang difasilitasi oleh bagian perencanaan pada setiap unit kerja eselon 1 untuk dikomunikasikan dengan biro perencanaan;

b. Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pencegahan stunting di Desa melalui program INEY dengan melibatkan banyak pihak, baik eksternal K/L seperti keterlibatan dari TP2AK Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Staf Presiden maupun dari lingkup internal kemendes dengan menggandeng Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tingkat Pusat dan Unit Kerja Eselon 1 lainnya di Kemendes untuk terjun ikut turun ke lapangan terlibat aktif dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan konvergensi pencegahan stunting di Desa melalui

Program INEY.

### F.3 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

#### Monitoring Normalisasi Data BMN K3

Monitoring normalisasi per 30 Juni 2022 terdapat 6 (enam) satker dengan status K3. Daftar satker monitoring normalisasi BMN aset tetap dengan status K3 (terlampir).

#### Monitoring Tutup Periode Semester 1 2022

Monitoring tutup periode per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut (belum tutup periode):

Jumlah Satker Belum Tutup Periode

Bulan	Persediaan	Aset Tetap	GLP
Januari	28	29	39
Februari	25	27	37
Maret	28	27	36
April	26	28	33
Mei	27	30	35
Juni	50	43	77
Jumlah	184	184	257

(Rincian satker Terlampir)

#### Monitoring Menu *To Do List* pada MONSAKTI

Berikut daftar *to do list* (hal-hal yang harus dilakukan oleh pengguna SAKTI) kelompok modul pelaporan:

No	Jenis	Jumlah Data	Modul
1	Persediaan belum Diditilkan	6.367	Persediaan
2	Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan	142	Persediaan
3	Aset Belum Diditilkan	98	Aset Tetap
4	RK Persediaan ke Aset Belum RM	2	Aset Tetap
5	Ketidaksesuaian akun vs kode barang aset tetap/ATB	136	Aset Tetap
6	Belum tutup periode GLP	77	GLP
7	Aset belum validasi Approve	19	Aset Tetap
8	Persediaan belum Approve	8	Persediaan

(Rincian Terlampir)

**Pagu Minus**

Berikut rincian Pagu Minus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 30 Juni 2022;

Kode	Satker	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	COA
255164	BPPMDDTT Jayapura	3.700.000,00	4.791.846,00	(1.091.846,00)	WA.6459EB A.511125
350453	Ditjen PEID	88.900.000,00	112.360.000,00	(23.460.000,00)	WA.6462EB A.511124
350453	Ditjen PEID	24.060.000,00	45.848.392,00	(21.788.392,00)	WA.6462EB A.511125
350456	Ditjen PDP	31.528.000,00	47.843.503,00	(16.315.503,00)	WA.6461EB A.511125
350480	BPPMDDTT Bengkulu	2.180.000,00	4.647.675,00	(2.467.675,00)	WA.6459EB A.511125
350480	BPPMDDTT Bengkulu	5.110.000,00	6.605.000,00	(1.495.000,00)	WA.6459EB A.511151
350484	BPPMDDTT Banjarmasin	87.051.000,00	98.990.000,00	(11.939.000,00)	WA.6459EB A.511124
350485	BPPMDDTT Denpasar	3.476.000,00	4.668.453,00	(1.192.453,00)	WA.6459EB A.511125
<b>JUMLAH</b>		<b>246.005.000,00</b>	<b>325.754.869,00</b>	<b>(79.749.869,00)</b>	